RANCANGAN RENCANA KERJA

TAHUN 2026



DINAS TENAGA KERJA KOTA CIREBON

Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 123 Pekiringan Kec. Kesambi Kota Cirebon Telp. 0231-203622

www.disnaker.cirebonkota.go.id @disnakercirebonkota Disnaker Kota Cirebon

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon Perencanaan 2026 dapat tersusun sebagaimana mestinya.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon Perencanaan Tahun 2026 sebagai dokumen perencanaan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional PROPERNAS serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; dimaksudkan sebagai pedoman penyusunan perencanaan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon Perencanaan Tahun 2026.

Kami menyadari bahwa penyusunan Dokumen Renja ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, kami selalu membuka diri untuk dilakukan kritikan dan masukan demi penyempurnaan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan perubahan yang senantiasa terjadi.

Harapan kami semoga Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon Perencanaan Tahun 2026 ini dapat bermanfaat bagi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas maupun Pemerintah Kota Cirebon pada umumnya.

Cirebon, Juni 2025
KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KOTA CIREBON

Drs. AGUS SUHERMAN, SH.MH

NIP. 19690107 1999006 1 001

DAFTAR ISI

			Hal
KATA PENGANTAR			i
DAFTAR ISI			ii
DAFTAR TABEL			iii
BAB I	**PENDAHULUAN**		4
	1.1.	Latar Belakang	4
	1.2.	Landasan Hukum	7
	1.3.	Maksud dan Tujuan	9
	1.4.	Sistematika Penulisan	9
BAB II	**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TAHUN LALU**		11
	2.1.	Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	11
	2.2.	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	34
	2.3.	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	35
	2.4.	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	37
	2.5.	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	61
BAB III	**TUJUAN, SARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**		62
	3.1.	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	62
	3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	65
BAB IV	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**		68
	4.1	Program dan Kegiatan	68
	4.2	Program Kegiatan dan Pendanaan	102
BAB V	**PENUTUP**		130
LAMPIRAN			

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1.	Realisasi Belanja Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon Tahun Anggaran 2024	12
Tabel 2.2.	Realisasi Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024	12
Tabel 2.3.	Formulir E81 Evaluasi terhadap Hasil renja Perangkat Daerah Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon Tahun 2025	14
Tabel 2.4.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon Tahun 2025	34
Tabel 2.5.	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kota Cirebon	38
Tabel 2.6.	Usulan Program dan Kegaiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kota Cirebon	51
Tabel 3.1.	Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Cirebon	66
Tabel 3.2.	Sasaran Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon	67
Tabel 4.1.	Rumusan Rencana Program dan Anggaran Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon dan Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026	69
Tabel 4.2	Program dan Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2026	103

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada Pasal 1 angka 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, sedangkan pada angka 43 disebutkan bahwa Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Berdasarkan Surat Edaran Wali Kota Cirebon Nomor 050/SE.433-Bappelitbangda tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal, Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Perencanaan 2026 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon, tidak terkecuali Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon berkewajiban untuk melaksanakan penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang akan menjadi pedoman Perangkat Daerah berdasarkan kepada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Proses penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja dalah sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

   Penyusunan rancangan awal Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon berpedoman pada Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon, hasil evaluasi hasil Renja tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja tahun berjalan.

2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah

   Rancangan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Cirebon untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD. Verifikasi ini dapat menjamin rancangan Renja Perangkat Daerah sudah selaras dengan rancangan awal RKPD.

3. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

   Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon mengikuti Kegiatan Forum Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Cirebon.

4. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah

   Perumusan rncangan akhir dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

1.1.1. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 90 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon, Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja. Selain itu, berdasarkan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 51 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Dan Badan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.

a. Kedudukan

1. Dinas Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja.
2. Dinas Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas dan Fungsi

1. Tugas Pokok

Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang tenaga kerja.

2. Fungsi

Dinas Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah bidang tenaga kerja;

b. pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah bidang tenaga kerja;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang tenaga kerja;
d. pelaksanaan administrasi dinas dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Struktur Organisasi

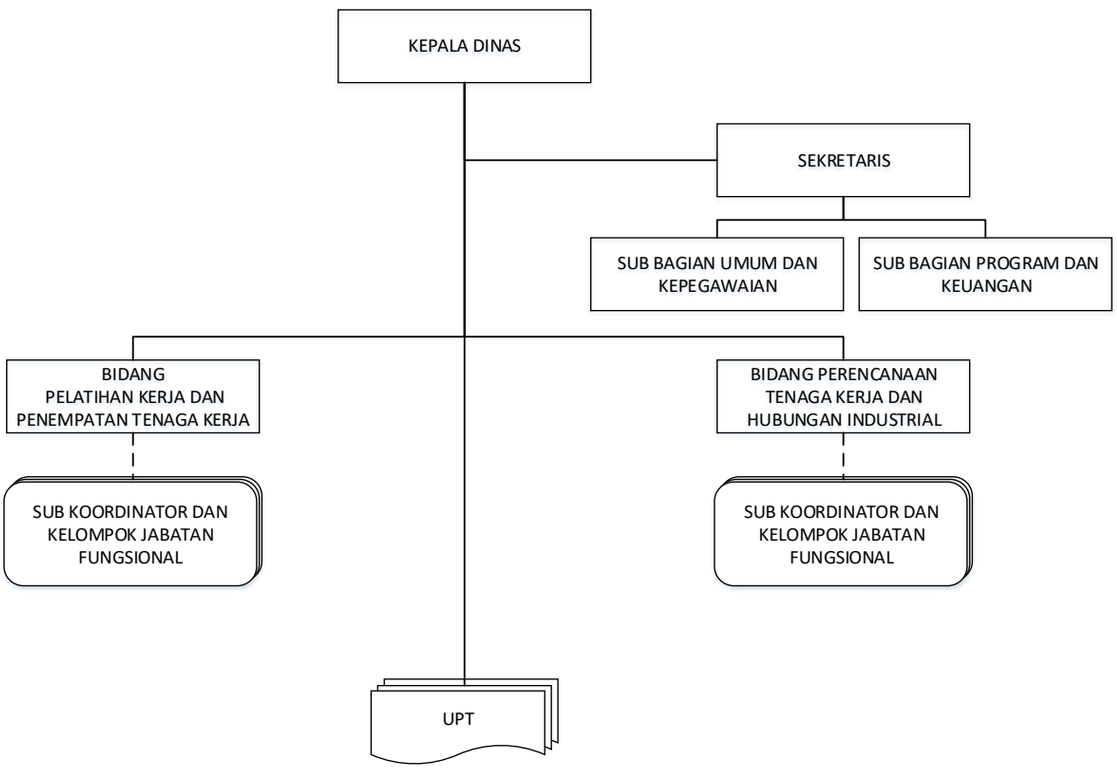
Secara struktural, Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 90 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 23 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon, Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Dinas setingkat eselon II b.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 90 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 23 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon, organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon terdiri atas :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
c. Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja, terdiri dari :
    1. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
d. Bidang Perencanaan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial, terdiri dari :
    1. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
e. UPT.

Bagan struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon adalah sebagai berikut :

Gambar 1.2.1.
Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon



Sumber : Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 90 Tahun 2021

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum tentang penyusunan Rencana Kerja Perencanaan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
15. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;
16. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon;
17. Peraturan Walikota Kota Cirebon Nomor 90 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Cirebon Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon;

18. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 43 Tahun Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun 2024-2026.
19. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2025;
20. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
21. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025-2045.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dilakukannya penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon Perencanaan Tahun 2026 adalah dalam rangka memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah, khususnya ketenagakerjaan yang berkesinambungan dan selaras dengan RPJMD Kota Cirebon dan RENSTRA Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon.

Adapun tujuan dilakukannya penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon perencanaan Tahun 2026 adalah menjadi pedoman bagi penyusunan APBD Kota Cirebon perencanaan Tahun 2026 serta :

1. Agar program dan kegiatan yang akan dilakukan pada Tahun Anggaran Perencanaan 2026 sesuai dengan RPJMD Kota Cirebon dan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon;
2. Memberi gambaran yang jelas dalam melakukan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
3. Menjadi acuan dalam menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LAKIP); serta
4. Menjadi landasan bagi seluruh pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon untuk mencapai tingkat kinerja yang lebih baik dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon maupun Visi Misi Pemerintah Kota Cirebon pada umumnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun perencanaan 2026 ini adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

I.1. Latar Belakang

I.2. Landasan Hukum

I.3. Maksud dan Tujuan

I.4. Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tahun Lalu

Berisi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah; Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah serta Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

II.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2025 dan Capaian Renstra

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan (Tabel 2.2)

II.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

II.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD (Tabel 2.3)

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Berisi telaahan terhadap kebijakan Nasional ; Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah; serta Program dan Kegiatan.

III.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

III.2. Tujuan dan Sasaran Renja

BAB IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisi Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

IV.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Bab V Penutup

Berisi kesimpulan serta cacatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon selama Tahun 2025 dan perkiraan target capaian Tahun 2026. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut:

a. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

b. **Capaian Analisis Kinerja**

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Pada Rencana Kerja pada Tahun 2024, Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon yang mengelola anggaran Pada Triwulan IV (empat) Tahun 2024, Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon mengelola anggaran belanja APBD Kota Cirebon sebesar **Rp 10.204.573.605,-** (Sepuluh miliar dua ratus empat juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima rupiah)**,** yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar **Rp 9.168.827.965,-** (Sembilan miliar seratus enam puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) dan Belanja Modal sebesar **Rp 1.035.745.640,-** (Satu miliar tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus empat puluh rupiah).

Belanja Operasi dan Modal digunakan untuk membayar gaji 24 (dua puluh empat) orang pegawai, selain itu digunakan untuk melaksanakan 5 (lima) program melalui 18 (delapan belas) kegiatan dan 46 (empat puluh enam) sub kegiatan dengan hasil evaluasi pelaksanaan sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Realisasi Belanja Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon
Tahun Anggaran 2024

Sumber : Sub Bagian Program dan Keuangan (2024)

No.	Jenis Belanja	Target (Rp)	Realisasi	
			Rp	Persentase
APBD Kota Cirebon				
1	**Belanja Operasi :**	**9.168.827.965**	**6.682.628.128**	**72,88%**
	Belanja Pegawai	4.416.375.338	4.401.822.222	91,52%
	Belanja Barang dan Jasa	4.752.452.627	2.640.805.906	55,57%
2	**Belanja Modal**	**1.035.745.640**	**922.750.000**	**89,09%**
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.035.745.640	922.750.000	89,09%
	Jumlah	**10.204.573.605**	**7.605.378.128**	**74,53%**
APBN Kementerian Ketenagakerjaan				
1	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas : Kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi	853.500.000	665.175.358	77,93%

Realisasi anggaran pada tahun 2024 sebesar 74,53% menunjukkan bahwa kinerja anggaran Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon Tahun 2024 adalah cukup baik, di bawah ini ditampilkan realisasi anggaran masing-masing secretariat, bidang dan UPT yang ada di Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Realisasi Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024

No	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 3,335,141,148	Rp. 1,308,181,779	39,22%
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 344,997,572	Rp. 332,264,972	96,31%
3.	Program Hubugngan Industrial dan Program Perencanaan Tenaga Kerja	Rp. 229,997,555	Rp. 208,181,338	90,51%
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 6,294,437,330	Rp. 5,756,750,039	91,46%

	JUMLAH	Rp. 10,204,573,605	Rp. 7,605,378,128	74,53%

Sumber LKPJ Disnaker Tahun 2024

Adapun capaian pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon Tahun 2024 sampai dengan perkiraan tahun 2024 akhir periode dapat dilihat pada Tabel 2.3:

Tabel 2.3.Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah
Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon
Periode Pelaksanaan: 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)/Sub Kegiatan (*Output*)	Satuan Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun Berjalan (n-1) yang Dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab	Keterangan
						I		II		III		IV							
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3		6		7		8		9		10		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6 x100%		15	
2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar																		
	Bidang Perencanan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial																		
2.07.02	**Program Perencanaan Tenaga Kerja**	**Jumlah Dokumen/Peraturan Kebijakan mengenai ketenagakerjaan**	**Dokumen**	**1**	**58.999.407**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**58.014.550**	**0**	**0**	**1**	**58.014.550**	**100%**	**98,33%**		
2.07.02.2.01	**Peyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	**Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD)**	**Dokumen**	**1**	**58.999.407**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**58.014.550**	**0**	**0**	**1**	**58.014.550**	**100%**	**98,33%**		faktor pendukung : kerjasama para pihak penghambat : keterbatasan waktu
2.07.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen	1	58.999.407	0	0	0	0	1	58.014.550			1	58.014.550	100%	98%		
2.07.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	Perusahaan	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				

2.07.05	**Program Hubungan Industrial**	**Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak dibagi jumlah perusahaan**	**Persen**	**1**	**170.998.148**		**23.292.798**		**18.700.947**		**12.861.447**	**1**	**95.311.596**	**26%**	**150.166.788**	**26%**	**87,82%**		
2.07.05.2.01	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota**	**Jumlah Perusahaan yang memiliki sarana dan prasarana Hubungan Industrial**	**Perusahaan**	**66**	**50.999.488**	**1**	**18.838.548**	**46**	**6.351.447**	**22**	**6.611.447**	**26**	**18.615.096**	**95**	**50.416.538**	**123%**	**98,3%**		pendukung : meningkatnya kesadaran perusahaan terkait peraturan yang ada penghambat : tidak dapat bertemu dengan owner sehingga menunggu pengambil kebijakan
2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahaan	65	11.824.800	**1**	0	46	2.140.000	22	0	26	9.366.500	95	11.506.500	146,15%	97,31%		sampai dengan oktober 7.390.000 terdapat 77 perusahaan yang telah disahkan

2.07.05.2.01.02	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Perusahaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00%	0,00%		kegiatan dilaksanakan ditahun 2025
2.07.05.2.02.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan	4	39.174.688	1	18.838.548	1	4.211.447	1	6.611.447	1	9.248.596	4	38.910.038	100,00%	99,32%		Perubahan output pada renja p
2.07.05.02.02	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama**	**Perkara**	**10**	**119.998.660**	**8**	**4.454.250**	**10**	**12.349.500**	**4**	**6.250.000**	**7**	**76.696.500**	**29**	**99.750.250**	168,09%	**92%**		

2.07.05.02.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Perkara	10	18.039.600	8	0	10	0	4	0	7	17.323.500	29	17.323.500	290,00%	96,03%		jumlah perselisihan yang masuk 22 yang selesai melalui perjanjian bersama 21, melalui anjuran 1 pengadilan HI realisasi pagu 2.478.000
2.07.05.02.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	1 Asosiasi 10 Serikat Pekerja	1 Asosiasi 10 Serikat	9.530.120	0	0	0	0	0	0	1 Asosiasi 10 serikat pekerja	9.414.000	1 Asosiasi 10 serikat pekerja	9.414.000	100,00%	98,78%		sosialisai dan verifikasi belum melakukan verif keanggotaan serikat pekerja rencana pelaksanaan verifikasi akhir oktoberrealisasi pagu 5.810.750
2.07.05.2.02. 01	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Lembaga	1	74.486.540	0	4.454.250	0	12.349.500	1	0	0	38.734.000	1	55.537.750	100,00%	74,6%		kegiatan yang sudah dilaksanakan monitoring dan posko THR, rakor may day, posko may day, rapat depeko, dan rapat LKS Tripartit

2.07.05.02.02.05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	3,000	17.942.400	0	0	0	0	5,5	6.250.000	0	11.225.000	5,47	17.475.000	182,37%	97,4%		realisasi anggaran 17.475.000 sosialisasi jaminan sosial nasional (BPJS Ketenagakerjaan) 50 orang 25 perusahaan
2.07.03	**Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**	**Presentase Pencaker terdaftar yang memiliki sertifikat kompetensi = (Jumlah Pencaker terdaftar yang memiliki sertifikat kompetensi / Jumlah pencaker terdaftar)**	**Persen**	**4,60**	**3.825.333.148**		**5.268.456**		**30.943.584**	**4,04%**	**58.422.684**	**2**	**1.213.547.055**	**4,04%**	**1.308.181.779**	**1%**	**34,20%**		
2.07.03.2.01	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**Keluaran : Jumlah alumni pelatihan yang bersertifikasi kompetensi**	**Orang**	**112**	**3.765.333.512**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59**	**50.650.000**		**1.198.810.143**	59	**1.249.460.143**	**87%**	**51,41%**		
2.07.03.2.01. 01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi (UPT Balai	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	254	2.908.964.232					176		58	522.770.143	234	522.770.143	92,13%	17,97%		

	Latihan Tenaga) Kerja)																	
2.07.03.2.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/ Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun-n	Lembaga	0	0							0		0	-	0,00%	0,00%		Kegiatan tidak dilaksanakan ditahun ini
2.07.03.2.01.03	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Unit	96	856.369.280	0		0		3	50.650.000	76	676.040.000	79	726.690.000	82,29 %	84,9%		sudah dilaksanakan belanja DAU spesifik kursi meja 40, AC 2, mesin las 7 yang tidak diserap mesin pres,proyekyor, printer karena harga tidak sesuai standar
2.07.03.2.02	**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi**	**Lembaga**	**2**	**59.999.636**	**0**	**5.268.456**	**0**	**30.943.584**	**0**	**7.772.684**	**2**	**14.736.912**	**2**	**58.721.636**	**100%**	**98%**		

2.07.03.2.02. 01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Lembaga	22	59.999.636		5.268.456	15	30.943.584		7.772.684	7	14.736.912	22	58.721.636	100,00%	97,87%		sudah dilaksanakan 22 orang, 15 lpk di kumpulkan untuk sosialisasi, 7 lpk dikunjungi
2.07.03.02.03	**Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja**	**Jumlah Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja yang terdaftar**	**Perizinan**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00%	0,00%		
2.07.03.02.03.01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara terintegrasi	Perizinan	0	0									0	-	0,00%	0,00%		
2.07.03.2.04	**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	**Jumlah Perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas**	**Perusahaan**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00%	0,00%		
2.07.03.2.04.01	Konsultansi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil Yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Perusahaan	0	0									0	-	0,00%	0,00%		
2.07.03.02.05	**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas**	**Dokumen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00%	0,00%		

2.01.03.02.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya Saing tenaga Kerja di Tingkat daerah	Dokumen	0	0									0	-	0,00%	0,00%		
2.07.04	**Program Penempatan Tenaga Kerja**	**Presentase tenaga kerja yang mendapatkan program Pelayanan Antar Kerja / Jumlah Pencaker yang terdaftar**	**Persen**	**40%**	**344.997.572**		**10.796.912**		**43.228.568**	**75,8%**	**141.623.068**		**136.616.424**	**75,8%**	**332.264.972**	**190%**	**96,31%**		realisasi bidang : pagu 259511956 kinerja
2.07.04.2.01	**Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah penempatan tenaga kerja melalui informasi pasar kerja**	**Orang**	**850**	**114.998.776**	**0**	**5.528.456**	**529**	**35.455.884**	**428**	**11.652.684**	**163**	**55.704.712**	**####**	**108.341.736**	**112%**	**91,85%**		Target 850 penempatan AKAD AKL AKAN
2.07.04.2.01.01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah SDM pelaanan antar kerja yang mendapatkan pelatihan melalui BIMTEK dan lain-lain untuk peningkatan kompetensi	Orang	0	0									0	-	0,00%	0,00%		

2.07.04.2.01. 02	Pelayanan antar kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui pelayanan AKAD dan AKL	Orang	625	28.999.800			406		336		100	27.897.000	842	27.897.000	134,72%	96,20%		Jumlah penempatan tenaga kerja melebihi target karena jumlah penempatan di Job Fair meningkat.capaian kinerja merupakan hasil job canvasing
2.07.04.2.01. 03	Penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja	Jumlah pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang	90	60.999.436	0	5.528.456	90	35.455.884		8.292.684		11.056.912	90	60.333.936	100,00%	98,91%		Gaji Non ASN 3 Bulan pelaksanaan di 3 sekolah smk alhidayah, smk kartika, IAIN
2.07.04.2.01.04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja yang Disabilitas yang mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	Orang	22	24.999.540					2	3.360.000	20	16.750.800	22	20.110.800	100,00%	80,44%		sudah dilakukan 2 orang untuk pendampingan pelatihan BBPVP, 20 orang akan dilaksanakan di bulan november pelatihan soft skill (motivasi, pengenalan ULD)
2.07.04.2.01. 05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	0	0									0	-	0,00%	0,00%		
2.07.04.02.02	**Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)**	**Jumlah LPTKS yang mendapatkan Pengawasa**	**Lembaga**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**-**	**0%**	0,00%		

	dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**n dan Pengendalian**																
2.07.04.02.02.02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang dilakukan pengawasan dan pengendalian dengan aturan yang berlaku	Lembaga	0	0								0		0,00%	0,00%		
2.07.04.2.03	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**Jumlah Data dan Informasi yang dihasilkan melalui aplikasi informasi pasar kerja online**	**Dokumen**	**1**	**134.999.660**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**122.197.700**		**12.106.000**		**134.303.700**	**114%**	99,48%		
2.07.04.02.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem On line (Karie Hub)	Orang	0	0								0	-	0,00%	0,00%		

2.07.04.2.03.03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	325	134.999.660					100	122.197.700	269	12.106.000	369	134.303.700	113,54%	99,48%		Karena hampir seluruh perusahaan yang mengikuti Job Fair mengumpulkan laporan penempatannya karena yang belum memberikan laporan penempatan kita datangi. terdapat 30 perusahan yang mengikuti total loker 1480
2.07.04.2.04	**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang medapatakan pelatihan**	**Orang**	**35**	**94.999.136**	**0**	**5.268.456**	**0**	**7.772.684**	**0**	**7.772.684**	**25**	**68.805.712**	**25**	**89.619.536**	100%	**83%**		
2.07.04.02.04.01	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) / Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	Orang	5	14.999.640							5	10.077.640	5	10.077.640	100,00%	67,19%		sudah ada 2 kasus yang terselesaikan

2.07.04.2.04.03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	PMI Purna yang Diberdayakan	Orang	20	79.999.496	0	5.268.456	0	7.772.684	0	7.772.684	20	58.728.072	20	79.541.896	100,00%	99,43%		pelaksanaan di akhir oktober karena pencairan menggunakan TU pelatihan tataboga
2.07.04.02.05	**Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Dokumen Penerbitan Perpanjangan IMTA**	**Dokumen**	**0**	**0**									**0**	**-**	**0%**	0,00%		
2.07.04.02.05.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Perpanjangan IMTA	Perizinan	0	0									0	-	0,00%	0,00%		Perpanjangan sampai dengan sekarang 20 orang
	SEKRETARIAT																		
2.07.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai IKM Perangkat Daerah**	**Poin**	**87,30**	**6.294.477.330**		**1.279.455.196**		**1.549.671.934**	**87,75**	**1.137.999.528**		**1.789.623.381**	**87,75**	**5.756.750.039**	100,52%	**91,46%**		
2.07.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Keluaran: Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jenis**	**5**	**124.098.272**		**16.937.106**		**20.663.580**	**1**	**20.917.659**	**4**	**61.768.727**	**5**	**120.287.072**	**100%**	**99%**		

2.07.01.2.01. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	15.045.500	1	3.450.000	2		1		1	11.540.000	5	14.990.000	100%	100%		
2.07.01.2.01. 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	2.740.200							1	2.740.000	1	2.740.000	100%	100%		kegiatan sudah dilaksanakan namun penyerapan anggaran menunggu prioritas pencairan
2.07.01.2.01. 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	2.765.100							1	2.750.000	1	2.750.000	100%	99%		kegiatan sudah dilaksanakan namun penyerapan anggaran menunggu prioritas pencairan
2.07.01.2.01. 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	2.765.700					0		1	2.760.000	1	2.760.000	100%	100%		
2.07.01.2.01. 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	2.765.700							1	2.760.000	1	2.760.000	100%	100%		

2.07.01.2.01. 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	8	33.685.236	2	5.008.456	2	7.947.684	2	7.512.684	2	13.216.412	8	33.685.236	100%	100%		LAPORAN tw 1 DAN 2
2.07.01.2.01. 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	10	64.330.836	3	8.478.650	1	12.715.896	2	13.404.975	4	26.002.315	10	60.601.836	100%	94%		
2.07.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Keluaran : Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah**	**Jenis**	**4**	**4.441.101.294**	**30**	**1.124.893.063**		**1.126.400.610**		**905.273.231**		**908.757.142**	**30**	**4.065.324.046**	**100%**	**87%**		
2.07.01.2.02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	25	4.398.105.258	25	1.119.884.607		1.118.187.926		894.360.547		900.122.142	25	4.032.555.222	100,00%	91,69%		
2.07.01.2.02. 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan	2	4.409.500							2	4.200.000	2	4.200.000	100,00%	95,25%		

		Akhir Tahun SKPD																	
2.07.01.2.02. 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	28	38.586.536	5	5.008.456	3	8.212.684	10	10.912.684	10	4.435.000	28	28.568.824	100,00 %	74,04%		laporan persediaan 7 lap, aset 7 lap, akuntansi 14 lap
2.07.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah**	**Jenis**	**1**	**26.298.000**		**0**		**0**	**1**	**23.999.239**		**0**	**1**	**23.999.239**	**100%**	**91,26%**		
2.07.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	26.298.000					1	23.999.239			1	23.999.239	100,00 %	91,26%		
2.07.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terwujudnya disiplin dan kapasitas aparatur Perangkat Daerah**	**Orang**	**26**	**64.612.500**		**0**		**0**	**25**	**0**	**0**	**58.500.000**	25	**58.500.000**	100,00 %	98,13%		

2.07.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0		0	-	0,00%	0,00%		Keterbatasan ketersediaan anggaran
2.07.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	59.612.500	0	0	0	0	0	0	1	58.500.000	1	58.500.000	100,00%	98,13%		Proses pengadaan
2.07.01.2.05.10	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	50	-	0	0	0	0	0	0	0		0	-	0,00%	0,00%		Kegiatan tidak dilaksanakan ditahun ini
2.07.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya sarana dan prasana kantor Perangkat DaerahDokumen Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jenis**	**9**	**406.668.522**		**79.015.364**	**3**	**80.862.074**	**1**	**91.510.399**		**124.326.678**	**4**	**375.714.515**	**94%**	**95%**		
2.07.01.2.06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jenis	2	9.930.400			2	9.930.400					2	9.930.400	100,00%	100,00%		

2.07.01.2.06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	38.007.700	1	37.023.500							1	37.023.500	100,00%	97,41%		
2.07.01.2.06. 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	8.008.278	0		1	8.008.278					1	8.008.278	100,00%	100,00%		
2.07.01.2.06. 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	4.740.000	0	1.125.000	1	450.000	0	900.000		1.116.000	1	3.591.000	50,00%	75,76%		
2.07.01.2.06. 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	5.134.560	0	2.021.600	1	2.100.000	0	400.000	1	612.000	2	5.133.600	100,00%	99,98%		
2.07.01.2.06. 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	Dokumen	2	121.925.000	0	2.502.000	1	26.502.000	1	39.668.000		43.668.000	2	112.340.000	100,00%	92,14%		
2.07.01.2.06. 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	25.007.000	3	10.000.000	3	4.000.000	2	6.750.000	4	4.150.000	12	24.900.000	100,00%	99,57%		
2.07.01.2.06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	36	154.346.000	6	19.949.000	0	20.780.000	11	33.701.003	19	60.888.150	36	135.318.153	100,00%	87,67%		

2.07.01.2.06. 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	39.569.584	0	6.394.264	0	9.091.396	0	10.091.396	1	13.892.528	1	39.469.584	100,00%	99,75%		monev per triwulan dari dispusip, dokumen di susun di TW IV
2.07.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Dokumen Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jenis**	**5**	**251.406.360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**196.060.000**	1	**196.060.000**	56,67%	77,99%		
2.07.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	0									0	-	0,00%	0,00%		
2.07.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0									0	-	0,00%	0,00%		
2.07.01.2.07.05	Pengadaan Mebelair	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0									0	-	0,00%	0,00%		
2.07.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Paket	0	0									0	-	0,00%	0,00%		
2.07.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung	Unit	30	251.406.360							17	196.060.000	17	196.060.000	56,67%	77,99%		kesulitan menyesuaikan harga dan spesifikasi

	Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan																pembelian swicth hub dan finger print
2.07.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0									0	-	0,00%	0,00%		
2.07.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jenis**	**3**	**528.906.362**	**3**	**13.434.963**	**3**	**156.255.120**	**3**	**58.130.000**	**3**	**284.707.534**	**3**	**512.527.617**	**100%**	**91,70%**		
2.07.01.2.08. 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	4.710.000							2	4.173.000	2	4.173.000	100,00%	88,60%		
2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	112.002.000	3	13.434.963	0		0		9	83.714.534	12	97.149.497	100,00%	86,74%		
2.07.01.2.08.04	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	3	412.194.362			3	156.255.120	0	58.130.000		196.820.000	3	411.205.120	100,00%	99,76%		

2.07.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Dokumen Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jenis**	**5**	**451.386.020**		**45.174.700**	**3**	**165.490.550**	**0**	**38.169.000**	**1**	**155.503.300**	**4**	**404.337.550**	**94%**	**88,40%**		
2.07.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	52.662.140	1	11.524.000	0	5.018.250	0	5.675.000		28.637.700	1	50.854.950	100,00 %	96,57%		
2.07.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	13	229.380.880	13	33.650.700	0	15.104.000	0	25.676.000		117.710.600	13	192.141.300	100,00 %	83,77%		
2.07.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	Unit	86	24.397.000	0		22	2.200.000	22	6.818.000	20	9.155.000	64	18.173.000	74,42 %	74,49%		

		Perizinanny a																
2.07.01.2. 09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	144.946.000	0		1	143.168.300					1	143.168.300	100,00 %	98,77%		
2.07.01.2. 09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	Unit	1	0									0	-	0,00%	0,00%		
Rata-rata capaian kinerja (%)																78,49 %	82%		
Predikat Kinerja																Tinggi	Sedang		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi yang baik dengan stakeholder disetiap kegiatan																			
Faktor penghambat pencapaian kinerja : harga tidak sesuai dengan standar SIPD, Produk sudah tidak ada, Keterbatasan SDM, Keterbatasan Pencairan GU, Belum memiliki sistem informasi database																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya :																			

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon dapat diukur melalui pencapaian Indikator Kinerja Utama. Hal ini disebabkan karena Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenagakerjaan telah berakhir pada Tahun 2016. Oleh karena itu, kinerja pelayanan yang ditampilkan adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon tidak memiliki SPM sehingga table dibawah ini kosong, seperti tersebut di bawah ini :

Tabel 2.4.
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon Tahun 2024

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun thn n-2	Tahun. thn n-1	Tahun thn n	Tahun.. thn n+1	Tahun .. thn n-2	Tahun.. thn n-1	Tahun.. thn n	Tahun .. thn n+1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-	-	-

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berkaitan dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, maka Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan arah dan tujuan pembangunan Bidang Ketenagakerjaan. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil penyelenggaraan tugas, diantaranya yaitu :

1. Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan bidang ketenagakerjaan;
2. Merumuskan kebijakan teknis bidang ketenagakerjaan;
3. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang ketenagakerjaan;
4. Membina dan melaksanakan tugas bidang ketenagakerjaan;
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selain hal-hal di atas, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berkaitan dengan kewenangan, terdapat kewenangan yang awalnya diselenggarakan oleh Pemerintah Kota menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, yaitu mengenai urusan pengawasan ketenagakerjaan. Berkaitan dengan hal tersebut, program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan pada Tahun 2017 tidak lagi mengakomodir bidang pengawasan ketenagakerjaan.

Kondisi Kota Cirebon yang berkaitan dengan Bidang Tenaga Kerja di Kota Cirebon antara lain :

1. Dari jumlah angkatan kerja Kota Cirebon sebanyak 152.346 orang sesuai yang tercantum dalam Buku Perencanaan Tenaga Kerja Daerah Kota Cirebon Tahun 2019, 8,98% angkatan kerja Kota Cirebon merupakan penganggur terbuka;
2. Jumlah pencari kerja berdasarkan tingkat pendidikan pada tahun 2019, yang terbanyak adalah lulusan SLTA ke bawah, yaitu 1738 orang;
3. Jumlah Bursa Kerja Khusus yang terdaftar pada tahun 2019 adalah 27 BKK;
4. Jumlah perusahaan yang terdaftar pada tahun 2019 adalah 1.514 perusahaan;
5. Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang terdaftar sebanyak 32 LPK.

Kondisi di atas tentu menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kota Cirebon, khususnya Dinas Tenaga Kerja yang harus diselesaikan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas.

Beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi umumnya masih sama dengan yang dihadapi pada Tahun 2019 antara lain :

1. Sarana dan prasarana Dinas, terutama mengenai status kepemilikan gedung yang terbatas dan masih menjadi sengketa menyebabkan kinerja menjadi kurang optimal, contohnya bantuan Provinsi mengenai pembangunan tidak dapat dilakukan di lahan yang sekarang ditempati Dinas;
2. Terbatasnya kuantitas SDM Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon jika dibandingkan dengan rasio keluasan tugas-tugas dan permasalahan yang dihadapi yang mencakup bidang pembangunan ketenagakerjaaan, sehingga mempengaruhi efektifitas pelaksanaan tugas secara umum. Saat ini total PNS yang ada Dinas berjumlah 24 orang (data per 1 Juni 2020).
3. Selain program/kegiatan yang didanai oleh APBD Kota Cirebon, terdapat pula program/kegiatan yang didanai oleh APBD Provinsi Jawa Barat dan APBN, padahal SDM pelaksana terbatas, sehingga tidak memadai untuk melaksanakan semua program/kegiatan;
4. Belum memiliki sistem informasi/data yang terintegrasi, sehingga menyulitkan dalam pengumpulan/pengolahan dan analisis data, ketenagakerjaan.

Berbagai permasalahan dan hambatan di atas, tentu berdampak pada tingkat pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Selain itu, dalam meningkatkan pelayanan ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon menghadapi tantangan dan peluang sebagai berikut :

A. **Tantangan**

Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon dalam meningkatkan pelayanan ketenagakerjaan antara lain :

1. Adanya peningkatan penggunaan aplikasi berbasis elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan;
2. Kesiapan tenaga kerja Kota Cirebon dalam menghadapi revolusi industri 4.0;
3. Belum semua perusahaan dan pekerja di Kota Cirebon menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

B. **Peluang**

Di samping tantangan yang dihadapi, dalam rangka meningkatkan pelayanan ketenagakerjaan di Kota Cirebon, Dinas Tenaga Kerja mempunya peluang sebagai berikut :

1. Faktor geografis yang strategis dan mudah terjangkau, telah tersedianya sarana komunikasi dan transportasi yang sudah menjangkau seluruh wilayah;
2. Kota Cirebon sebagai pusat pertumbuhan ekonomi wilayah Cirebon dan Jawa Barat yang penting;
3. Adanya kerjasama dengan berbagai perusahaan untuk meningkatkan kompetensi dan penempatan tenaga kerja Kota Cirebon;
4. Adanya aplikasi penempatan tenaga kerja berbasis internet yang memberikan kemudahan kepada warga Kota Cirebon untuk mendapatkan pekerjaan melalui aplikasi cirebonlunga.cirebonkota.go.id;
5. Perkembangan Kota Cirebon sebagai kota tujuan wisata memberikan peluang tumbuhnya industri kreatif;
6. Meningkatnya peran LKS Tripartit.

Dari uraian di atas, isu penting yang diangkat Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon dalam pemetaan permasalahan untuk prioritas dan sasaran pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas kompetensi tenaga kerja;
2. Peningkatan penempatan tenaga kerja;
3. Peningkatan perluasan kesempatan kerja;
4. Peningkatan Perlindungan Tenaga Kerja.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada awal rancangan RKPD, program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kota Cirebon

Perangkat Daerah : Dinas Tenaga Kerja

KODE REKENING					RANCANGAN AWAL RKPD (2026)					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
					RUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	17
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**12.243.128.620**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**11.272.031.550**	
2	07				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**				**12.243.128.620**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**				**11.272.031.550**	
2	07	02			**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**Kota Cirebon**	**Jumlah Dokumen/Peraturan Kebijakan mengenai ketenagakerjaan**	**2 Dokumen**	**320.000.000**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**Kota Cirebon**	**Jumlah Dokumen/Peraturan Kebijakan mengenai ketenagakerjaan**	**2 Dokumen**	**75.000.000**	
2	07	02	2.01		**Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	**Kota Cirebon**	**Keluaran : Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD)**	**2 Dokumen**	**320.000.000**	**Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	**Kota Cirebon**	**Keluaran : Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD)**	**2 Dokumen**	**75.000.000**	

							Hasil : Tersedianya Informasi Tenaga Kerja Makro dan Mikro tenaga kerja Kota Cirebon	**100 ,00**	**persen**				**Hasil : Tersedianya Informasi Tenaga Kerja Makro dan Mikro tenaga kerja Kota Cirebon**	**100,0 0**	**persen**		
2	07	02	2.01	01	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro		Jumlah Dokumen Rencana tenaga Kerja makro	1	dokumen	250.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro		Jumlah Dokumen Rencana tenaga Kerja makro	1	dokumen	40.000.000	
2	07	02	2.01	02	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro		Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	25	Perusahaan	70.000.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro		Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	50	Orang	35.000.000	Kegiatannya bimtek selama 2-3 hari dengan peserta dari HRD Perusahaan. Rencana narasumber dari pusat lalu belajar praktek langsung sehingga dokumen bisa langsung jadi.
2	07	03			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Kota Cirebon**	**Presentase Pencaker terdaftar yang memiliki sertifikat kompetensi = (Jumlah Pencaker terdaftar yang memiliki sertifikat kompetensi / Jumlah pencaker terdaftar)**	6,00	persen	**2.356.895.000**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Kota Cirebon**	**Presentase Pencaker terdaftar yang memiliki sertifikat kompetensi = (Jumlah Pencaker terdaftar yang memiliki sertifikat kompetensi / Jumlah pencaker terdaftar)**	6,00	persen	**2.345.874.000**	

2	07	03	2.01		**Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan beradasarkan Unit Kompetensi**	**Kota Cirebon**	**Keluaran : Jumlah alumni pelatihan yang bersertifikasi kompetensi**	**142**	**Orang**	**2.065.000.000**	**Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan beradasarkan Unit Kompetensi**	**Kota Cirebon**	**Keluaran : Jumlah alumni pelatihan yang bersertifikasi kompetensi**	**240**	**Orang**	**2.030.000.000**	
							Hasil :Terpenuhinya kebutuhan pengembangan kemampuan pencari kerja	**100 ,00**	**persen**				Hasil :Terpenuhinya kebutuhan pengembangan kemampuan pencari kerja				
2	07	03	2.01	01	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi pad Tahun - n	142	Orang	1.400.000.000	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi pad Tahun - n	240	Orang	1.400.000.000	Penyesuaian harga per paket pelatihan
2	07	03	2.01	02	Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja		Jumlah Kesepakatan/ Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun-n	1	Lembaga	35.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja		Jumlah Kesepakatan/ Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun-n	0	Lembaga	-	nomenklatur sama dengan 0006
2	07	03	2.01	03	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota		Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	15	Unit	630.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota		Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	54	Unit	605.000.000	- Jumlah unit menyesuaikan jumlah peserta pelatihan - pengadaan mesin jahit - ……

										Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas		Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n	1 Kesepakatan	25.000.000	Hilsi/Forlat vokasi/P2ISI kegiatan penyediaan instruktur, sertifikasi instruktur
2	07	03	02.02		**Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**Kota Cirebon**	**Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi**	**2 Lembaga**	**41.895.000**	**Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**Kota Cirebon**	**Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang TerAkreditasi**	**2 Lembaga**	**130.000.000**	
							Hasil :Terpenuhinya pembinaan LPK di Kota Cirebon	**100,00 persen**				Hasil :Terpenuhinya pembinaan LPK di Kota Cirebon			
2	07	03	02.02	01	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	30 Lembaga	41.895.000	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Cirebon	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	30 Lembaga	130.000.000	1. Bimtek akreditasi lembaga 30 2. Pembinaan/kunjungan monitoring LPK sebanyak 30 LPK
2	07	03	02.03		**Kegiatan Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja**	**Kota Cirebon**	**Jumlah Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja yang terdaftar**	**1 Perizinan**	**30.000.000**	**Kegiatan Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja**	**Kota Cirebon**	**Jumlah Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja yang terdaftar**	**1 Perizinan**	**4.449.000**	

							Hasil : Tersedianya Perizinan lembaga pelatihan kerja terintegrasi	**100,00**	**persen**				Hasil : Tersedianya Perizinan lembaga pelatihan kerja terintegrasi	**100,00**	**persen**		
2	07	03	02.03	01	Sub Kegiatan Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi		Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara terintegrasi	1	Perizinan	30.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi		Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara terintegrasi	1	Perizinan	4.449.000	
2	07	03	02.04		**Kegiatan Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	**Kota Cirebon**	**Jumlah Perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas**	**18**	**Perusahaan**	**60.000.000**	**Kegiatan Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	**Kota Cirebon**	**Jumlah Perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas**	**16**	**Perusahaan**	**50.000.000**	
							Hasil :Terpenuhinya pembinaan produktivitas tenaga kerja di 5 (lima) perusahaan kecil	**100,00**	**persen**				Hasil :Terpenuhinya pembinaan produktivitas tenaga kerja di 5 (lima) perusahaan kecil	**100,00**	**persen**		
2	07	03	02.04	01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil		Jumlah Perusahaan Kecil Yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	18	Perusahaan	60.000.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil		Jumlah Perusahaan Kecil Yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	16	Perusahaan	50.000.000	Peningkatan Produktivitas pada Perusahaan, berdasarkan permasalahan dari perusahaan. Yang nantinya ditingkatkan dari permasalahan yang ada. Bentuknya bimtek dan konsultasinya.

															Memiliki timnya sendiri seperti instruktur, asesornya dari Pusat. -Bimtek 3 hari - Bimkon - Gaji Non ASN 1 org
2	07	03	02.05		**Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Cirebon**	**Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas**	**1 Dokumen**	**160.000.000**	**Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Cirebon**	**Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas**	**1 Dokumen**	**131.425.000**	
							Hasil :Tersedianya Dokumen Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja	**100,00 persen**				Hasil :Tersedianya Dokumen Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja	**100,00 persen**		
2	07	03	02.05	01	Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja		Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya Saing tenaga Kerja di Tingkat daerah	1 Dokumen	160.000.000	Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja		Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya Saing tenaga Kerja di Tingkat daerah	1 Dokumen	131.425.000	- Menggunakan konsultan dan tim ahli, dokumen pengukuran produktivitas tenaga kerja tingkat kota. Kegiatannya berbentuk Kajian FGD, narasumber dari Kemnaker dan Pesertanya dari Perusahaan-

															perusahaan. Yang mengkajinya ada tim ahli dari Jasa Konsultan akan menghasilkan bahan untuk dibahas dalam FGD
2	07	04			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Kota Cirebon**	**Presentase tenaga kerja yang mendapatkan program Pelayanan Antar Kerja / Jumlah Pencaker yang terdaftar**	**45,00 persen**	**538.872.500**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Kota Cirebon**	**Presentase tenaga kerja yang mendapatkan program Pelayanan Antar Kerja / Jumlah Pencaker yang terdaftar**	**45,00 persen**	**572.188.500**	
2	07	04	2.01		**Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota**	**Kota Cirebon**	**Jumlah penempatan tenaga kerja melalui informasi pasar kerja**	**950 Orang**	**214.660.000**	**Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota**	**Kota Cirebon**	**Jumlah penempatan tenaga kerja melalui informasi pasar kerja**	**950 Orang**	**260.428.500**	
							Hasil :Terpenuhinya penempatan tenaga kerja melalui AKAD, AKAL dan AKAN dan pemberdayaan Kelompok Tenaga Kerja Mandiri	**100,00 persen**				Hasil :Terpenuhinya penempatan tenaga kerja melalui AKAD, AKAL dan AKAN dan pemberdayaan Kelompok Tenaga Kerja Mandiri	**100,00 persen**		

2	07	04	2.01	01	Sub Kegiatan Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja		Jumlah SDM pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	2 Orang	27.562.500	Sub Kegiatan Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja		Jumlah SDM pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	28 Orang	24.524.500	Bimtek petugas antar kerja
2	07	04	2.01	02	Sub Kegiatan Pelayanan Antar Kerja		Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Pelayanan AKAD dan AKL	675 Orang	27.562.500	Sub Kegiatan Pelayanan Antar Kerja		Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Pelayanan AKAD dan AKL	675 Orang	24.524.500	sosialisasi tentang penempatan tenaga kerja
2	07	04	2.01	03	Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	180 Orang	100.000.000	Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	300 Orang	142.366.000	- bimbingan jabatan untuk SMA, SMK, MA, Perguruan Tinggi - Gaji Non ASN 1 orang
2	07	04	2.01	04	Sub Kegiatan Penyelenggaran Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan		Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	3 Orang	27.562.500	Sub Kegiatan Penyelenggaran Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaa n		Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	22 Orang	24.524.500	- transport pendampingan untuk 2 orang - bimtek dan sosialisasi untuk 20 orang
2	07	04	2.01	05	Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja		Jumlah Tenaga kerja yang Diberdayakan Melalui Perluasan Kesempatan Kerja	10 Orang	31.972.500	Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja		Jumlah Tenaga kerja yang Diberdayakan Melalui Perluasan Kesempatan Kerja	10 Orang	44.489.000	pembentukan tenaga kerja mandiri

2	07	04	02.02		**Kegiatan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Cirebon**	**Jumlah LPTKS yang mendapatkan Pengawasan dan Pengendalian**	**1 Lembaga**	**10.000.000**	**Kegiatan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Cirebon**	**Jumlah LPTKS yang mendapatkan Pengawasan dan Pengendalian**	**1 Lembaga**	**4.449.000**	
							Hasil : Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	**100,00 persen**				Hasil : Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	**100,00 persen**		
2	07	04	02.02	02	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian LPTKS		Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang berlaku	1 Lembaga	**10.000.000**	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian LPTKS		Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang berlaku	1 Lembaga	4.449.000	
2	07	04	02.03		**Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**Kota Cirebon**	**Jumlah Data dan Informasi yang dihasilkan melalui aplikasi informasi pasar kerja online**	**1 Dokumen**	**159.862.500**	**Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**Kota Cirebon**	**Jumlah Data dan Informasi yang dihasilkan melalui aplikasi informasi pasar kerja online**	**1 Dokumen**	**184.686.500**	
							Hasil :Terpenuhinya Informasi lowongan kerja di Kota Cirebon	**100,00 persen**				Hasil :Terpenuhinya Informasi lowongan kerja di Kota Cirebon			

2	07	04	02.03	02	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online		Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem On line (Karie Hub)	2000	Orang	27.562.500	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online		Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem On line (Karie Hub)	2000	Orang	24.524.500	- Sosialisasi mengenai Aplikasi Siap Kerja Semua informasi sudah tersedia dalam aplikasi siap kerja
2	07	04	02.03	03	Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/ Bursa Kerja	375	Orang	132.300.000	Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/ Bursa Kerja	375	Orang	160.162.000	- job fair - meningkatkan perusahaan peserta job fair
2	07	04	02.04		**Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota**	**Kota Cirebon**	**Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang medapatakan pelatihan**	**35**	**Orang**	**137.812.500**	**Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota**	**Kota Cirebon**	**Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang medapatakan pelatihan**	**35**	**Orang**	**122.624.500**	
							Hasil :Terpenuhinya pemberdayaan Kelompok Tenaga Kerja Mandiri	**100,00**	**persen**				Hasil :Terpenuhinya pemberdayaan Kelompok Tenaga Kerja Mandiri	**100,00**	**persen**		
2	07	04	02.04	01	Sub Kegiatan Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) /Pekerja Migran Indoonesia (PMI)		Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	5	Orang	27.562.500	Sub Kegiatan Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) /Pekerja Migran Indoonesia (PMI)		Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	5	Orang	24.524.500	- penanganan permasalahan PMI

2	07	04	02.04	03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan		Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	30	Orang	110.250.000	Sub Kegiatan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan		Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	30	Orang	98.100.000	- Honor Non ASN - pelatihan purna PMI
2	07	04	02.05		**Kegiatan Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Cirebon**	**Dokumen Penerbitan Perpanjangan IMTA**	**1**	**Dokumen**	**16.537.500**	**Kegiatan Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Cirebon**	**Dokumen Penerbitan Perpanjangan IMTA**	**0**	**Dokumen**	**-**	
							Hasil :Tersedianya Dokumen Perpanjangan Perizinan Tenaga Asing	**100,00**	**persen**								
2	07	04	02.05	01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Penerbitan Perpanjangan IMTA	1	Perizinan	16.537.500	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Penerbitan Perpanjangan IMTA	0	Perizinan	-	Perpanjangan IMTA dilakukan secara aplikasi on line yang siapkan oleh Kemnaker
								90,00	**persen**					**90,00**	**persen**		
2	07	05			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Kota Cirebon**	**Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak dibagi jumlah perusahaan**	**1,00**	**Persen**	**463.360.000**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Kota Cirebon**	**Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak dibagi jumlah perusahaan**	**5,00**	**Persen**	**455.777.188**	**sudah berapa perusahaan dari jumlah perusahaan yang ada**

2	07	05	2.01		**Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Cirebon**	**Jumlah Perusahaan yang memiliki sarana dan prasarana Hubungan Inustrial**	**76**	**Perusahaan**	**105.047.500**	**Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Cirebon**	**Jumlah Perusahaan yang memiliki sarana dan prasarana Hubungan Inustrial**	**76**	**Perusahaan**	**97.464.688**	
							Hasil :Terpenuhinya fasilitasi sarana hubungan industrial dan kesejahteraan pekerja	**100,00**	**persen**				Hasil :Terpenuhinya fasilitasi sarana hubungan industrial dan kesejahteraan pekerja	**100,00**	**persen**		
2	07	05	2.01	01	Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan		Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	75	Perusahaan	20.000.000	Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan		Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	75	Perusahaan	20.000.000	- pembinaan peraturan perusahaan melalui kunjungan perusahaan -
2	07	05	2.01	02	Sub Kegiatan Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan		Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	1	Perusahaan	20.000.000	Sub Kegiatan Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan		Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	1	Perusahaan	12.417.188	

2	07	05	2.01	03	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan		Jumlah Data dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1	Laporan	65.047.500	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan		Jumlah Data dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1	Laporan	65.047.500	- sosialisasi tentang PKWT
2	07	05	02.02		**Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Cirebon**	**Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama**	**10**	**Perkara**	**358.312.500**	**Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Cirebon**	**Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama**	**10**	**Perkara**	**358.312.500**	
							Hasil :Terpenuhinya fasilitasi pencegahan perselisihan Hubungan Industial dan mogok kerja	**100,00**	**persen**				Hasil :Terpenuhinya fasilitasi pencegahan perselisihan Hubungan Industial dan mogok kerja	**100,00**	**persen**		
2	07	05	02.02	01	Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan		Indikator: Jumlah Perselisihan yang Dicegah	8	Perkara	77.175.000	Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan		Indikator: Jumlah Perselisihan yang Dicegah	8	Perkara	77.175.000	- sosialisasi mengenai pencegahan perselisihan

					Perusahaan yang Berakibat/ berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					Perusahaan yang Berakibat/ berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					
2	07	05	02.02	02	Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	10 Perkara	33.075.000	Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	10 Perkara	33.075.000	
2	07	05	02.02	03	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh serta Non Afiliasi		Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	10 dan 1 Asosiasi Serikat Pekerja	27.562.500	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh serta Non Afiliasi		Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	1 dan 10 Asosiasi Serikat Pekerja	27.562.500	- APINDO - 10 Serikat pekerja
2	07	05	02.02	04	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	165.375.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	165.375.000	
2	07	05	02.02	05	Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas		Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	3.200 Orang	55.125.000	Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas		Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	38.200 Orang	55.125.000	- capaian peserta jamsostek april 2024 = 38.080

					Kesejahteraan Pekerja					Kesejahteraan Pekerja					
2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Kota Cirebon**	**Nilai IKM Perangkat Daerah**	**87,50**	**poin**	**8.564.001.120**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Kota Cirebon**	**Nilai IKM Perangkat Daerah**	**88,00**	**poin**	**7.823.191.862**	capaian tahun 2024 = 87,75 poin
2	07	01	2.01		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kota Cirebon**	**Keluaran: Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**5**	**jenis**	**108.802.005**	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kota Cirebon**	**Keluaran: Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**5**	**jenis**	**152.356.000**	
							Hasil: Tersedianya informasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi sebagai bahan dan acuan pelaksanaan kegiatan perangkat daerah	**100,00**	**persen**				**Hasil: Tersedianya informasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi sebagai bahan dan acuan pelaksanaan kegiatan perangkat daerah**	**100,00**	**persen**		
2	07	01	2.01	01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	dokumen	26.315.730	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	dokumen	27.500.000	1. SOP 2. dokumen Renja 3. FPD 4. dokumen RKT 5. Renstra 6. Renja Perubahan

2	07	01	2.01	02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	2.247.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	2.247.000	
2	07	01	2.01	03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	2.247.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	2.247.000	
2	07	01	2.01	04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	2.247.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	2.247.000	
2	07	01	2.01	05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 dokumen	3.115.200	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 dokumen	3.115.000	
2	07	01	2.01	06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	8 laporan	4.054.575	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	8 laporan	40.000.000	gaji non ASN 1 orang

							Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
2	07	01	2.01	07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	laporan	68.575.500	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19	laporan	75.000.000	- gaji non asn 2 orang
2	07	01	2.02		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kota Cirebon**	**Keluaran : Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah**	**29**	**jenis**	**5.140.954.540**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kota Cirebon**	**Keluaran : Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah**	**29**	**jenis**	**5.126.132.812**	
							Hasil : Tersedianya informasi keuangan perangkat daerah sebagai bahan audit keuangan perangkat daerah	**100 ,00**	**persen**				**Hasil : Tersedianya informasi keuangan perangkat daerah sebagai bahan audit keuangan perangkat daerah**	**100,0 0**	**persen**		
2	07	01	2.02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26	orang	5.093.550.000	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30	orang	5.093.550.000	kebutuhan disesuaikan dengan jumlah orang
2	07	01	2.02	05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	laporan	4.861.900	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	laporan	12.582.812	

2	07	01	2.02	07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semeteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semeteran SKPD	2	laporan	42.542.640	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semeteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semeteran SKPD	28	laporan	20.000.000	
2	07	01	2.03		**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kota Cirebon**	**Keluaran: Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**1**	**jenis**	**23.674.200**	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kota Cirebon**	**Keluaran: Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**1**	**jenis**	**23.674.000**	
							Hasil: Tersedianya data dan informasi barang milik daerah pada perangkat daerah sebagai bahan audit	**100 ,00**	**persen**				**Hasil: Tersedianya data dan informasi barang milik daerah pada perangkat daerah sebagai bahan audit**	**100,0 0**	**persen**		
2	07	01	2.03	02	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	dokumen	23.674.200	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	dokumen	23.674.000	
2	07	01	2.05		**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kota Cirebon**	**Keluaran: Pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian**	**60**	**orang**	**185.635.690**	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kota Cirebon**	**Keluaran: Pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian**	**60**	**orang**	**160.000.000**	

							Hasil: Persentase pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian	**100,00**	**persen**				**Hasil: Persentase pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian**	**100,00**	**persen**	
2	07	01	2.05	01	Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasaranan Disiplin Pegawai		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	5	unit	70.849.900	Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasaranan Disiplin Pegawai		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2	unit	70.000.000	kegiatan olahraga dan rohani
2	07	01	2.05	02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5	paket	91.633.290	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3	paket	75.000.000	pengadaan pakaian PDH,Pakaian Hitam Putih,Batik, Olahraga
2	07	01	2.05	10	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50	orang	23.152.500	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30	orang	15.000.000	
2	07	01	2.06		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kota Cirebon**	**Keluaran: Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**9**	**jenis**	**662.187.180**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kota Cirebon**	**Keluaran: Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**9**	**jenis**	**662.519.000**	
							Hasil: Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**100,00**	**persen**				**Hasil: Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100,00**	**persen**	

2	07	01	2.06	01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	20.837.175	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	21.000.000	-gedung kantor - gedung UPT
2	07	01	2.06	02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	60.767.175	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	60.750.000	ATK
2	07	01	2.06	03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket	11.576.250	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	11.576.000	
2	07	01	2.06	04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	7.998.060	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	8.000.000	- gas - apar
2	07	01	2.06	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	18.305.000	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	18.305.000	
2	07	01	2.06	06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	256.314.160	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	256.500.000	iklan dan koran
2	07	01	2.06	08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	48.600.600	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	48.600.000	setiap bulan
2	07	01	2.06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 laporan	195.289.700	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 laporan	195.289.000	

2	07	01	2.06	10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	42.499.060	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	42.499.000	honor non asn 1 orang
2	**07**	**01**	**2.07**		**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kota Cirebon**	**Keluaran: Dokumen Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**5 jenis**	**1.217.408.965**	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kota Cirebon**	**Keluaran: Dokumen Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**5 jenis**	**495.348.550**	
							Hasil: Terpenuhinya Jasa Penunjang Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan tepat waktu	**100 ,00 persen**				**Hasil: Terpenuhinya Jasa Penunjang Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan tepat waktu**	**100,0 0 persen**		
2	**07**	**01**	**2.07**	01	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	585.635.690	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 unit	0	
2	**07**	**01**	**2.07**	02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	226.012.500	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 unit	53.907.550	jumlah kendaraan operasional yang harus dihapuskan = 7 kendaraan
2	**07**	**01**	**2.07**	05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebelair		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 paket	46.305.000	Sub Kegiatan Pengadaan Mebelair		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 paket	46.305.000	meja dan kursi kantor
2	**07**	**01**	**2.07**	06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 paket	145.730.900	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 paket	145.730.000	mesin las fabrikasi

2	**07**	**01**	**2.07**	10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 unit	164.112.375	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 unit	165.000.000	laptop pc printer scanner ac TV
2	**07**	**01**	**2.07**	11	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	49.612.500	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	84.406.000	
2	07	01	2.08		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Cirebon**	**Keluaran: Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah**	**3 jenis**	**607.674.890**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Cirebon**	**Keluaran: Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah**	**3 jenis**	**616.185.000**	
							Hasil: Terpenuhinya Jasa Penunjang Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan tepat waktu	**100 ,00 persen**				**Hasil: Terpenuhinya Jasa Penunjang Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan tepat waktu**	**100,0 0 persen**		
2	07	01	2.08	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 laporan	4.859.190	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 laporan	5.000.000	
2	07	01	2.08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	116.630.700	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	125.000.000	

2	07	01	2.08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 laporan	486.185.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 laporan	486.185.000	
2	07	01	2.09		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Cirebon**	**Keluaran: Dokumen Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**5 jenis**	**617.663.650**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Cirebon**	**Keluaran: Dokumen Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**5 jenis**	**586.976.500**	
							Hasil: Terpeliharanya Barang Milik Daerah sebagai Fasilitasi Kinerja ASN pada Perangkat Daerah	**100 ,00 persen**				**Hasil: Terpeliharanya Barang Milik Daerah sebagai Fasilitasi Kinerja ASN pada Perangkat Daerah**	**100,0 0 persen**		
2	07	01	2.09	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	67.630.650	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	67.630.000	
2	07	01	2.09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 unit	234.454.500	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 unit	234.454.000	Roda 4 = 3 unit, Roda 2 = 9 unit

					Operasional atau Lapangan					Dinas Operasional atau Lapangan					
2	07	01	2.09	06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 unit	46.305.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 unit	46.305.000	
2	07	01	2.09	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	230.686.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	200.000.000	
2	07	01	2.09	10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	38.587.500	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	38.587.500	taman/halaman

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 perencanaan 2026 ini, usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat hasil Musrenbang belum terakomodir dalam program dan kegiatan Dinas dikarenakan bersamaan dengan penyusunan Renstra Dinas. Sebenarnya ada beberapa program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas, misalnya pelatihan, akan tetapi belum dapat dilaksanakan seperti tercantum dalam tabel 2.10. di bawah ini :

Tabel 2.6.
Usulan Program dan Kegaiatan Dari Para Pemangku Kepentingan
Perencanaan 2026

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Tenaga Kerja	Kota Cirebon	Membuat Roti & Kue (PAD)	16 Orang	
2			Optimalisasi Pemasaran (DBCHT)	16 Orang	
3			Konten Visual (DBCHT)	16 Orang	
4			Digital Marketing (DBCHT)	16 Orang	
5			Roti & Kue (DBCHT)	16 Orang	
6			Penata Rambut Junior (DBCHT)	16 Orang	
7			Menjahit Pakaian dengan Mesin (DBCHT)	32 Orang	
8			Service AC (DBCHT)	16 Orang	
9			Montir Sepeda Motor (DBCHT)	16 Orang	
10			Pelatihan Mengemudi Mobil (Pokir)	16 Orang	
11			Pelatihan Pembuatan Roti dan Kue (Pokir)	16 Orang	
12			Pelatihan Digital Marketing (Pokir)	16 Orang	

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

A. Arah Kebijakan Nasional dan Provinsi Bidang Ketenagakerjaan

Pembangunan ketenagakerjaan semakin memegang peran sentral dalam pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang saat ini, tidak terkecuali di Indonesia. Memasuki periode keempat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025, pembangunan ketenagakerjaan semakin menjadi aspek krusial untuk diprioritaskan. Hal ini terlihat dari salah satu sasaran pokok yang bertujuan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing. Berikut adalah beberapa tantangan perihal ketenagakerjaan yang dapat dirangkum dari materi Renstra Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020- 2024: **Pertama**, perkembangan peningkatan jumlah penduduk Indonesia usia produktif yang menghasilkan besarnya jumlah angkatan kerja akan menjadi tantangan bagi Pemerintah dalam menyediakan kesempatan kerja yang layak, kedua hal tersebut akan berkaitan dengan aspek skills (keterampilan) dan labour market (pasar kerja). Di dalam kompenen Skills, terdapat tiger sub komponen yang memiliki perkembangan menurun yakni, skillset of graduates yang memiliki nilai 61, digital skills among population yang memiliki nilai 62, dan ease of finding skilled employees yang memiliki nilai 61'

Perkembangan data tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan tenaga kerja yang memiliki keterampilan/ keahlian masih menjadi tantangan bagi daya saing Indonesia. Sedangkan komponen labour market memiliki nilai 57,8 dan memiliki tren yang menurun. Dari komponen labour market, terdapat lima sub komponen yang memiliki perkembangan menurun yakni, cooperation in labour-employer relations, active labour policies, ease of hiring foreign labour, reliance on professional management, labour tax rate %. Dan perkembangan tersebut, permasalahan hubungan industrial dan kemudahan merekrut tenaga kerja asing masih menjadi hambatan bagi indeks daya saing Indonesia. Di masa mendatang, sektor ekonomi semakin

membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keahlian digital, mengingat mulai bermunculan gejala transformasi ekonomi ke arah automation (otomatisasi) atau digital ekonomi.

Kedua, Dalam konteks kesejahteraan, transformasi ekonomi dan pasar tenaga kerja yang tidak pasti seiring hadirnya digitalisasi tentu membutuhkan penguatan perlindungan sosial. Peraturan ketenagakerjaan harus ditinjau ulang untuk dapat melindungi tenaga kerja secara umum dan juga untuk memfasilitasi transisi kerja sebagai konsekuensi dari transformasi ekonomi yang sedang berlangsung. Perkembangan teknologi digital semakin memperlebar sektor informal khususnya di negara berkembang. Sektor informal tidak lagi hanya mencakup pekerjaan bergaji tidak tetap seperti yang dikenal sebelumnya yang didominasi oleh tenaga kerja berketerampilan rendah (unskilled), akan tetapi juga model kerja baru seperti kemitraan yang dijalankan oleh start-up transportasi online (ridehailing) Grab dan Gojek. Oleh karena itu pekerjaan sektor informal semakin menjadi tantangan besar bagi negara ekonomi berkembang. Klasifikasi pembagian pekerja sektor formal-informal harus dievaluasi karena perubahan kondisi kerja. Kegiatan ekonomi yang semakin dinamis, kebutuhan edukasi, kesehatan, dan model bisnis yang berubah memerlukan bentuk perlindungan sosial yang lebih universal. Besarnya sektor informal dan administrasi yang tidak efisien semakin memperberat beban fiskal yang ada untuk dapat menerapkan Univeral Basic Income. **Ketiga**, tantangan selanjutnya adalah mengenai sistem jaminan sosial ketenagakerjaan juga ditujukan untuk mendukung angkatan kerja dalam menghadapi masa transisi pasar tenaga kerja. Jaminan sosial diperlukan untuk mendukung transisi angkatan kerja muda dari sekolah ke bekerja.

Pemerintah perlu meningkatkan kesempatan pekerjaan yang layak bagipemuda melalui program pelatihan dan dukungan bagi wirausahawan muda. Sektor privat memiliki peran penting untuk menawarkan pemagangan. Tenaga kerja yang lebih senior jugs tidak bisa dinafikan dan merupakan aset bagi ekonomi dan masyarakat. Bagi yang ingin tetap aktif secara ekonomi harus diberi akses untuk mendapatkan pelatihan. Pemerintah bisa meningkatkan kesempatan untuk pensiun parsial (partial retirement) atau meningkatkan usia pensiun sebagai pilihan opsional namun tetap menjaga orang-orang tua bekerja tidak di luar batas

Sehubungan dengan penetapan sasaran strategis di atas, Kementerian Ketenagakerjaan telah merumuskan agenda prioritas pembangunan bidang ketenagakerjaan yang disebut dengan NAWA KERJA KETENAGAKERJAAN, yaitu sebagai berikut :

1. Penguatan Perencanaan Tenaga Kerja Nasional;
2. Percepatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja;
3. Percepatan Sertifikasi Profesi;
4. Perluasan Kesempatan Kerja Formal;
5. Penguatan Wirausaha Produktif;
6. Penciptaan Hubungan Industrial yang Sehat dan Produktif;
7. Penegakan Hukum Ketenagakerjaan;
8. Peningkatan Perlindungan Pekerja Migran;
9. Pelayanan Ketenagakerjaan Sederhana, Transparan dan Akuntabel.

B. Prioritas Kebijakan Provinsi Jawa Barat

Memahami tujuan, sasaran, dan program pemerintah daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan se!ama periode transisi tiga tahun pemerintahan pasca berakhirnya kepemimpinan Kepala Daerah Kota Cirebon tahun 2023.

Dalam RPD Kota Cirebon 2024-2026, isu pembangunan utama yang terkait dengan aspek ketenagakerjaan adalah **daya saing tenaga kerja masih rendah.** Dampak pandemi Covid-19 memicu konstraksi ekonomi sehingga menurunkan penciptaan kesempatan kerja dan meningkatkan jumlah PHK. Pasca Covid-19, TPT mengalami penurunan, tetapi laju pertumbuhan Angkatan kerja tidak seimbang dengan ketersedian kesempatan kerja. karakteristik sektor industri yang cenderung padat modal menyebabkan penyerapan tenaga kerja yang semakin kecil, angkatan kerja yang tidak dapat memenuhi kualifikasi persyaratan yang diminta dunia kerja, ketidakstabilan perekonomian, dan rendahnya wirausaha. Akar masalah lain yang menyebabkan tingginya tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat adalah rendahnyadaya saing tenaga kerja muda, dimana lulusan SMK mendominasi profil TPT di Kota Cirebon.

Untuk menyasar permasalahan tersebut, ditetapkan isu strategis yang terkait dengan bidang ketenagakerjaan berupa **peningkatan nilai investasi dan kualitas usaha.** Sasaran pembangunan untuk mewujudkan tujuan tersebut

adalah **Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha yang disertai dengan meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja** dengan target capaian indikator Tingkat Pengangguran Terbuka ditargetkan menurun setiap tahun. Target TPT Pada tahun 2024 sebesar 8,01%, diharapkan menurun pada tahun 2025 menjadi 7,88%, hingga menjadi 7,76% pada tahun 2026

3.2. Tujuan dan Sasaran

Dalam perencanaan pembangunan, tujuan merupakan suatu kondisi ideal yang diharapkan tercapai dalam jangka waktu tertentu. Adapun sasaran merupakan suatu rumusan sebagai upaya merancang keadaan yang dapat menggambarkan pencapaian tujuan. Gambaran keadaan ini berupa hasil pembangunan daerah dan perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome dan impact program-program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan, sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah. Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Pada periode pembangunan jangka menengah sebelumnya, perumusan tujuan dan sasaran mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah terpilih.Namun, pada periode ini, perumusan tujuan dan sasaran menggunakan pendekatan yang berbeda karena tidak tersedianya visi dan misi Kepala Daerah.

Sebagaimana arahan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2024 dan Daerah Otonom Baru, penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cirebon Tahun 2025-2029 didasarkan pada Visi & Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cirebon yang berlaku,

analisa sasaran pokok dan/atau arah kebijakan RPJPD Kota Cirebon, serta isu strategis aktual.

Visi Kota Cirebon 2025-2029 disusun dengan memperhatikan potensi dan permasalahan pembangunan kota serta proyeksi arah pembangunan yang akan dihadapi Kota Cirebon. Dalam RJMD Kota Cirebon 2025-2045 dirumuskan visi Kota Cirebon adalah “Terwujudnya Kota Cirebon Yang Sejahtera, Tertata, Aspiratif, Religius, Aman, dan Berkelanjutan Tahun 2029 (Terwujudnya Kota Cirebon Yang Setara Berkelanjutan Tahun 2029”.

Selanjutnya berdasarkan visi pembangunan tersebut, ditetapkan Lima Misi Pembangunan Kota Cirebon Tahun 2025-2029 dalam dimensi religius, kesehatan, pendidikan, ekonomi, lingkungan, sarana dan prasarana umum serta pemerintahan, yakni:

1. Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Siang;
2. Meningkatkan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal;
3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Bebas KKN dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
4. Mewujudkan Keseimbangan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Berkelanjutan dan Berketahanan;
5. Meningkatkan Pemberdayaan Sosial dan Budaya Lokal.

Terdapat 5 (Lima) tujuan yang ditetapkan sebagai tujuan pembangunan jangka menengah Kota Cirebon untuk tahun perencanaan 2025-2029 sebagai berikut:

1. Terwujudnya SDM yang unggul, kompetitif dan berkarakter
2. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan sektor unggulan daerah
3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas
4. Terwujudnya Penataan Lingkungan Kota yang Berkelanjutan
5. Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui penurunan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, pelestarian budaya lokal dalam pembangunan yang berkelanjutan

Sasaran

Sasaran Dinas Tenaga Kerja Kopta Cirebon terdapat di sasaran ke-9 yaitu Menurunnya tingkat pengangguran

Tabel 3.1

Tujuan dan sasaran
Pemerintah Daerah Kota Cirebon

Tujuan	Sasaran
Tersujudnya SDM yang unggul, kompetitif dan berkarakter	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Kota (Juta/Tahun/Pekerja)

Sumber RPD Kota Cirebon tahun 2025-2029

Sedangkan sasaran Dinas Tenaga Kerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Saasran Strategis
Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2026
1.	Meningkatnya Kompetensi dan Kualifikasi Tenaga Kerja	Presentase Pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi = (∑ pencari kerja yang dilatih/ ∑ Pendaftar pelatihan berbasis kompetensi) x 100%	60 persen
2.	Meningkatmya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalm dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kab/kota dalam 1 daerah provinsi (jumlah pencaker yang ditempatkan dibagi jumlah pencaker yang terdaftar x 100%	44 persen
3.	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase perselisihan HI yang diselesaikan melalui PB oleh mediator (Jumlah penyelesaian dengan PB dibagi Jumlah perusahaan pada jumlah kasus perselisihan x 100%)	100 persen
4.	Meningkatnya Kinerja penyelenggaraan Perangkat Daerah	Nilai Capaian Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	87.5 poin

Sumber : Recana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan

Rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon Tahun 2026, dapat dilihat pada Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Analisis kebutuhan Tahun 2026 pada lampiran Tabel 4.1. berikut ini:

Tabel 4.1.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
dan Hasil Ananlisis Kebutuhan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
					DINAS TENAGA KERJA								11.643.124.000					12.225.280.200,00
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								11.643.124.000					12.225.280.200,00
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								11.643.124.000					12.225.280.200,00
2	07	01			PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								8.009.284.312					8.409.748.527,60
2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								152.356.000					159.973.800,00
2	07	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													

						Indeks Kematangan Organisasi	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	Terpenuhinya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Cirebon	47,00	6 Dokumen	6 Dokumen	27.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	6 Dokumen	28.875.000,00
2	07	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
						Indeks Kematangan Organisasi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terpenuhinya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Cirebon	47,00	1 Dokumen	1 Dokumen	2.247.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dokumen	2.359.350,00
2	07	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD													

						Indeks Kematangan Organisasi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terpenuhinya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Cirebon	47,00	1 Dokumen	1 Dokumen	2.247.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.359.350,00
2	07	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
						Indeks Kematangan Organisasi	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Terpenuhinya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Cirebon	47,00	1 Dokumen	1 Dokumen	2.247.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.359.350,00
2	07	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD													

						Indeks Kematangan Organisasi	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Terpenuhinya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Kota Cirebon	47,00	1 Dokumen	1 Dokumen	3.115.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	3.270.750,00
2	07	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
						Indeks Kematangan Organisasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terpenuhinya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Cirebon	47,00	8 Laporan	8 Laporan	40.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	42.000.000,00

2	07	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
						Indeks Kematangan Organisasi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Cirebon	47,00	19 Laporan	19 Laporan	75.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19 Laporan	78.750.000,00
2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								5.126.132.812					
2	07	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Indeks Kematangan Organisasi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Cirebon	47,00	26 Orang/Bulan	26 Orang/Bulan	5.093.550.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/Bulan	5.348.227.500,00
2	07	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													

						Indeks Kematangan Organisasi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terpenuhinya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Cirebon	47,00	1 Laporan	1 Laporan	12.582.812	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	13.211.952,60
2	07	01	2.02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD													
						Indeks Kematangan Organisasi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semeteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	terpenuhinya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Cirebon	47,00	28 Laporan	28 Laporan	20.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semeteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	28 Laporan	21.000.000,00

2	07	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								23.674.000					24.857.700,00
2	07	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD													
						Indeks Kematangan Organisasi	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terpenuhinya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Cirebon	47,00	1 Dokumen	1 Dokumen	23.674.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	24.857.700,00
2	07	01	2,03	0004	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD													
						Indeks Kematangan Organisasi	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kota Cirebon	47,00	-	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		-
2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								160.000.000					168.000.000,00
2	07	01	2.05	00	Peningkatan Sarana dan Prasaranan Disiplin Pegawai													

				01													
						Indeks Kematangan Organisasi	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Terpenuhinya Peningkatan Sarana dan Prasaranan Disiplin Pegawai	Kota Cirebon	47,00	2 Unit	2 Unit	70.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit	73.500.000,00
2	07	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya												
						Indeks Kematangan Organisasi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Terpenuhinya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Cirebon	47,00	5 Paket	5 Paket	75.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	78.750.000,00
2	07	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan												

						Indeks Kematangan Organisasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terpenuhinya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Cirebon	47,00	50 Orang	50 Orang	15.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	15.750.000,00
2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								662.519.000					695.644.950,00
2	07	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
						Indeks Kematangan Organisasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Cirebon	47,00	2 Paket	2 Paket	21.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	22.050.000,00
2	07	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Indeks Kematangan Organisasi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Cirebon	47,00	1 Paket	1 Paket	60.750.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	63.787.500,00
2	07	01	2.06	00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													

				03													
						Indeks Kematangan Organisasi	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Terpenuhinya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Cirebon	47,00	2 Paket	2 Paket	11.576.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	12.154.800,00
2	07	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						Indeks Kematangan Organisasi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Cirebon	47,00	2 Paket	2 Paket	8.000.000			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	8.400.000,00
2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
						Indeks Kematangan Organisasi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terpenuhinya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Cirebon	47,00	2 Paket	2 Paket	18.305.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	19.220.250,00
2	07	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													

						Indeks Kematangan Organisasi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Terpenuhinya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Cirebon	47,00	2 Dokumen	2 Dokumen	256.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	269.325.000,00
2	07	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
						Indeks Kematangan Organisasi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Cirebon	47,00	12 Laporan	12 Laporan	48.600.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	51.030.000,00
2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Indeks Kematangan Organisasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Cirebon	47,00	36 Laporan	36 Laporan	195.289.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	205.053.450,00
2	07	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													

						Indeks Kematangan Organisasi	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terpenuhinya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Cirebon	47,00	1 Dokumen	1 Dokumen	42.499.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	44.623.950,00
2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								681.441.000					715.513.050,00
2	07	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
						Indeks Kematangan Organisasi	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Terpenuhinya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Cirebon	47,00	-	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-
2	07	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
						Indeks Kematangan Organisasi	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Terpenuhinya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Cirebon	47,00	4 Unit	4 Unit	240.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	252.000.000,00
2	07	01	2.07	05	Pengadaan Mebel													

							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Hasil: Terpenuhinya Pengadaan Mebelair	Kota Cirebon	47,00	2 Unit	2 Unit	46.305.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	48.620.250,00
2	07	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Indeks Kematangan Organisasi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Terpenuhinya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Cirebon	47,00	7 Unit	7 Unit	145.730.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	153.016.500,00
2	07	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
						Indeks Kematangan Organisasi	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Terpenuhinya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Cirebon	47,00	7 Unit	7 Unit	165.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	173.250.000,00
2	07	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													

						Indeks Kematangan Organisasi	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Terpenuhinya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Cirebon	47,00	1 Unit	1 Unit	84.406.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	88.626.300,00
2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								616.185.000					646.994.250,00
2	07	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
						Indeks Kematangan Organisasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Cirebon	47,00	2 Laporan	2 Laporan	5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	5.250.000,00
2	07	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						Indeks Kematangan Organisasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Cirebon	47,00	12 Laporan	12 Laporan	125.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	131.250.000,00

2	07	01	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
						Indeks Kematangan Organisasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Cirebon	47,00	3 Laporan	3 Laporan	486.185.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	510.494.250,00
2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								586.976.500					616.325.325,00
2	07	01	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
						Indeks Kematangan Organisasi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Cirebon	47,00	1 Unit	1 Unit	67.630.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	71.011.500,00
2	07	01	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												

						Indeks Kematangan Organisasi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Cirebon	47,00	13 Unit	13 Unit	234.454.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	246.176.700,00
2	07	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel													
						Indeks Kematangan Organisasi	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Kota Cirebon	47,00	-	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	-
2	07	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Indeks Kematangan Organisasi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Cirebon	47,00	8 Unit	8 Unit	46.305.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	48.620.250,00
2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													

						Indeks Kematangan Organisasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpenuhinya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Cirebon	47,00	2 Unit	2 Unit	200.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	210.000.000,00
2	07	01	2.09	0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
						Indeks Kematangan Organisasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpenuhinya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Cirebon	47,00	1 Unit	1 Unit	38.587.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	40.516.875,00
2	07	02			PERENCANAAN TENAGA KERJA								150.000.000					157.500.000,00
2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)								150.000.000					157.500.000,00
2	07	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro													
						Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu pada RTKD	Jumlah Dokumen Rencana tenaga Kerja makro	Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	Kota Cirebon	53,85	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Rencana tenaga Kerja makro	1 Dokumen	105.000.000,00

2	07	02	2.01	0003	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro												
						Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu pada RTKD	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kota Cirebon	53,85	75 Orang	75 Orang	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	75 Orang	52.500.000,00
2	07	03			PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA								2.385.000.000					2.504.250.000,00
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan beradasarkan Unit Kompetensi								2.030.000.000					2.131.500.000,00
2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi													
						Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun - n	Hasil : Terlaksananya Proses Pendidikan & Pelatihan Keterampiran Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Kota Cirebon	0,963	240 Orang	240 Orang	1.400.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun - n	240 Orang	1.470.000.000,00
2	07	03	2.01	0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja													

						Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya	Jumlah Kesepakatan/ Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun-n	Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Kota Cirebon	0,963	1 (Kesepakatan) Lembaga	1 (Kesepakatan) Lembaga	25.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kesepakatan/ Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun-n	1 (Kesepakatan) Lembaga	26.250.000,00
2	07	03	2.01	0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota													
						Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Tersedianya Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/ Kota	Kota Cirebon	0,963	54 Unit	54 Unit	605.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	54 Unit	635.250.000,00
2	07	03	2.01	0004	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi													

						Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi pad Tahun - n	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Kota Cirebon	0,963	-	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi pad Tahun - n	-	-
2	07	03	2.01	0005	Pengadaan Sarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas													
						Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Tersedianya Sarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Kota Cirebon	0,963	-	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan Vokasi dan Produktivitas	-	-
2	07	03	2.01	0006	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas													

						Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya	Jumlah Kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n	Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Kota Cirebon	0,963	-	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n	-	-
2	07	03	2,02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta								130.000.000					
2	07	03	2,02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta													
						Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Cirebon	0,963	30 Lembaga	30 Lembaga	130.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	30 Lembaga	136.500.000,00
2	07	03	2,03		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja								5.000.000					
2	07	03	2,03	0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi													

						Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara terintegrasi	Tersedianya Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Kota Cirebon	0,963	1 Perizinan	1 Perizinan	5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara terintegrasi	1 Perizinan	5.250.000,00
2	07	03	2,04		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil								60.000.000					
2	07	03	2,04	0001	Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil													
						Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya	Jumlah Perusahaan Kecil Yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Kota Cirebon	0,963	16 Perusahaan	16 Perusahaan	60.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Perusahaan Kecil Yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	16 Perusahaan	63.000.000,00
2	07	03	2,05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								160.000.000					
2	07	03	2,05	0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja													

						Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya Saing tenaga Kerja di Tingkat daerah	Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kota Cirebon	0,963	1 Dokumen	1 Dokumen	160.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya Saing tenaga Kerja di Tingkat daerah	1 Dokumen	168.000.000,00
2	07	04			PENEMPATAN TENAGA KERJA								643.062.500					675.215.625,00
2	07	04	2.01		Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota								292.687.500					307.321.875,00
2	07	04	2.01	0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja													
						Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam dan Luar Negeri	Jumlah SDM pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	Tersedianya SDM Pelayanan antar Kerja (Pengantar Kerja dan Petugas antar Kerja)	Kota Cirebon	44	28 Orang	28 Orang	27.562.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah SDM pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	28 Orang	28.940.625,00
2	07	04	2.01	0002	Pelayanan Antar Kerja													

						Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Pelayanan AKAD dan AKL	Terwujudnya Pelayanan antar Kerja	Kota Cirebon	44	675 Orang	675 Orang	27.562.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Pelayanan AKAD dan AKL	675 Orang	28.940.625,00
2	07	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja													
						Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Kota Cirebon	44	300 Orang	300 Orang	160.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	300 Orang	168.000.000,00
2	07	04	2.01	0004	Penyelenggaran Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan													
						Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	Terselenggaranya Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Kota Cirebon	44	3 Orang	3 Orang	27.562.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	3 Orang	28.940.625,00
2	07	04	2.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja													

						Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Tenaga kerja yang Diberdayakan Melalui Perluasan Kesempatan Kerja	Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja	Kota Cirebon	44	10 Orang	10 Orang	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Tenaga kerja yang Diberdayakan Melalui Perluasan Kesempatan Kerja	10 Orang	52.500.000,00
2	07	04	2,02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								5.000.000					5.250.000,00
2	07	04	2,02	0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi													
						Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	Tersedianya Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi	Kota Cirebon	44	-	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	-	-
2	07	04	2,02	0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS													
						Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam dan Luar Negeri	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang berlaku	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Kota Cirebon	44	1 Lembaga	1 Lembaga	5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang berlaku	1 Lembaga	5.250.000,00
2	07	04	2,03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja								207.562.500					217.940.625,00

2	07	04	2,03	0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Inormasi Pasar Kerja Online												
						Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Tersedianya Data dan Informasi Pencari Kerja yang Memanfaatkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kota Cirebon	44	-	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	-	-
2	07	04	2,03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online												
						Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem On line (Karie Hub)	Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kota Cirebon	44	2000 Orang	2000 Orang	27.562.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem On line (Karie Hub)	2000 Orang	28.940.625,00
2	07	04	2,03	0003	Job Fair/Bursa Kerja												

						Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/ Bursa Kerja	Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Kota Cirebon	44	375 Orang	375 Orang	180.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/ Bursa Kerja	375 Orang	189.000.000,00
2	07	04	2,04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota								137.812.500					144.703.125,00
2	07	04	2,04	0001	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) /Pekerja Migran Indoonesia (PMI)													
						Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam dan Luar Negeri	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Terlaksananya Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Kota Cirebon	44	5 Orang	5 Orang	27.562.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	5 Orang	28.940.625,00
2	07	04	2,04	0002	Penyediaan Layanan Terpadu pad Calon Pekerja Migran													

						Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam dan Luar Negeri	Jumlah CPMI/PMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	Tersedianya Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Kota Cirebon	44	-	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah CPMI/PMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	-	
2	07	04	2,04	0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan													
						Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam dan Luar Negeri	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	Terlaksananya Pemberdayaan PMI Purna Penempatan	Kota Cirebon	44	30 Orang	30 Orang	110.250.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	30 Orang	115.762.500,00
2	07	04	3,01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota								-					-
2	07	04	3,01	0008	Pemberian penghargaan kepada perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas													

						Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam dan Luar Negeri	Jumlah perusahaan yang Mendapatkan Penghargaan karena mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas	Terlaksananya Pemberian penghargaan kepada perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas	Kota Cirebon	44	-	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah perusahaan yang Mendapatkan Penghargaan karena mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas	-	-
2	07	04	3,01	0009	Pemberdayaan Bagi OAP Melalui Kegiatan Kewirausahaan													
						Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam dan Luar Negeri	Jumlah OAP Yang Diberdayakan melaui Kegiatan Kewirausahaan	Terselenggaranya Pemberdayaan Bagi OAP Melalui Kegiatan Kewirausahaan	Kota Cirebon	44	-	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah OAP Yang Diberdayakan melaui Kegiatan Kewirausahaan	-	-
2	07	04	3,01	0010	Koordinasi ke Perusahaan dalam Penempatan OAP pada semua jenis pekerjaan dengan memperhatikan kompetensi Sesuai Kebutuhan													

						Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi ke Perusahaan dalam Penempatan OAP pada semua jenis pekerjaan dengan memperhatikan kompetensi Sesuai Kebutuhan Yang Telah Dilaksanakan	Terlaksananya Koordinasi ke Perusahaan dalam Penempatan OAP pada semua jenis pekerjaan dengan memperhatikan kompetensi Sesuai Kebutuhan	Kota Cirebon	44	-	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi ke Perusahaan dalam Penempatan OAP pada semua jenis pekerjaan dengan memperhatikan kompetensi Sesuai Kebutuhan Yang Telah Dilaksanakan	-	-
2	07	04	4,05		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								-					-
2	07	04	4,05	0002	Validasi Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota													

						Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota Yang Divalidasi	Terlaksananya Validasi Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota	Kota Cirebon	44	-	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota Yang Divalidasi	-	-
2	07	05			HUBUNGAN INDUSTRIAL								455.777.188					478.566.047,40
2	07	05	2,01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								97.464.688					102.337.922,40
2	07	05	2,01	0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan													

						Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Kota Cirebon	41.660	75 Orang	75 Orang	20.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	75 Orang	21.000.000,00
2	07	05	2,01	0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan													
						Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Terlaksananya Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Kota Cirebon	41.660	1 Perusahaan	1 Perusahaan	12.417.188	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	1 Perusahaan	13.038.047,40
2	07	05	2,01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan													

						Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Kota Cirebon	41.660	1 Laporan	1 Laporan	65.047.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan	68.299.875,00
2	07	05	2,02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota								358.312.500					376.228.125,00
2	07	05	2,02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													
						Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah	Kota Cirebon	41.660	8 Perkara	8 Perkara	77.175.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Perselisihan yang Dicegah	8 Perkara	81.033.750,00

								Kabupaten/ Kota										
2	07	05	2,02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													
						Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Cirebon	41.660	10 Perkara	10 Perkara	33.075.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	10 Perkara	34.728.750,00
2	07	05	2,02	0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi													

						Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Hasil : Terselenggaranya Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Kota Cirebon	41.660	1 Asosiasi 10 Serikat pekerja	1 Asosiasi 10 Serikat pekerja	27.562.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	1 Asosiasi 10 Serikat pekerja	28.940.625,00
2	07	05	2,02	004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota												
						Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Terlaksananya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Cirebon	41.660	1 Lembaga	1 Lembaga	165.375.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah LKS Tripartit yang Dibina		173.643.750,00
2	07	05	2,02	00	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosisal Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja												

				05													
						Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	Terlaksanaanya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksanaanya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kota Cirebon	41.660	3200 Orang	3200 Orang	55.125.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksanaanya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	3200 Orang	57.881.250,00

4.2. Program Kegiatan dan Pendanaan

Rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon Tahun 2026, dapat dilihat Dalam Rencana Anggaran Akhir pada Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 pada lampiran Tabel 4.2. berikut ini:

Tabel 4.2.
PROGRAM DAN KEGIATAN PENDANAAN

RENJA AKHIR DINAS TENAGA KERJA TAHUN 2026

KODE REKENING					RANCANGAN AWAL RKPD (2026)							HASIL ANALISA KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
					URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		PAGU INDIKATIF (Rp)	KODE REKENING	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1					2	3	4	5		6		7	8	9	10		11	17
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**12.243.128.620**		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**12.395.546.684**	
2	07				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**					**12.243.128.620**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**					**12.395.546.684**	
2	07	02			**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**Kota Cirebon**	**Jumlah Dokumen/Peraturan Kebijakan mengenai ketenagakerjaan**	**2**	**Dokumen**	**320.000.000**		**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**Kota Cirebon**	**Jumlah Dokumen/Peraturan Kebijakan mengenai ketenagakerjaan**	**2**	**Dokumen**	**75.000.000**	
2	07	02	2.01		**Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	**Kota Cirebon**	**Keluaran : Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD)**	**2**	**Dokumen**	**320.000.000**		**Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	**Kota Cirebon**	**Keluaran : Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD)**	**2**	**Dokumen**	**75.000.000**	

							Hasil : Tersediany a Informasi Tenaga Kerja Makro dan Mikro tenaga kerja Kota Cirebon	**10 0, 00**	**perse n**					**Hasil : Tersedianya Informasi Tenaga Kerja Makro dan Mikro tenaga kerja Kota Cirebon**	**10 0, 00**	**perse n**		
2	07	02	2 . 0 1	01	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro		Jumlah Dokumen Rencana tenaga Kerja makro	1	dokum en	250.000.000		Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro		Jumlah Dokumen Rencana tenaga Kerja makro	1	dokum en	40.000.000	
2	07	02	2 . 0 1	02	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro		Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	25	Perus ahaan	70.000.000	2 07 02 2.01 0003	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro		Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	75	Orang	35.000.000	Kegiatannya bimtek selama 2-3 hari dengan peserta dari HRD Perusahaan. Rencana narasumber dari pusat lalu belajar praktek langsung sehingga dokumen bisa langsung jadi.
2	07	03			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Kota Cirebon**	**Presentase Pencaker terdaftar yang memiliki sertifikat kompetensi = (Jumlah Pencaker terdaftar yang memiliki sertifikat kompetensi / Jumlah**	6, 00	persen	**2.356.895.000**		**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Kota Cirebon**	**Presentase Pencaker terdaftar yang memiliki sertifikat kompetensi = (Jumlah Pencaker terdaftar yang memiliki sertifikat kompetensi / Jumlah**	6, 00	persen	**2.595.874.000**	

							pencaker terdaftar)							**pencaker terdaftar)**				
2	07	03	2.01		**Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan beradasarkan Unit Kompetensi**	**Kota Cirebon**	**Keluaran : Jumlah alumni pelatihan yang bersertifikasi kompetensi**	**142**	**Orang**	**2.065.000.000**		**Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan beradasarkan Unit Kompetensi**	**Kota Cirebon**	**Keluaran : Jumlah alumni pelatihan yang bersertifikasi kompetensi**	**240**	**Orang**	**2.280.000.000**	
							Hasil :Terpenuhinya kebutuhan pengembangan kemampuan pencari kerja	**100,00**	**persen**					Hasil :Terpenuhinya kebutuhan pengembangan kemampuan pencari kerja				
2	07	03	2.01	01	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi pad Tahun - n	142	Orang	1.400.000.000		Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi pad Tahun - n	280	Orang	1.650.000.000	Penyesuaian harga per paket pelatihan
2	07	03	2.01	02	Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja		Jumlah Kesepakatan/ Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan	1	Lembaga	35.000.000		Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja		Jumlah Kesepakatan/ Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana dan Prasarana	1	(Kesepakatan) Lembaga	25.000.000	nomenklatur sama dengan 0006

							Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun-n							Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun-n				
2	07	03	2.01	03	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota		Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	15	Unit	630.000.000	2.07.03.2.01.0003	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota		Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	54	Unit	605.000.000	- Jumlah unit menyesuaikan jumlah peserta pelatihan - pengadaan mesin jahit - ……
											2.07.03.2.01.0006	Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas		Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n	1	Kesepakatan	-	Hilsi/Forlat vokasi/P2ISI kegiatan penyediaan instruktur, sertifikasi instruktur
2	07	03	02:02		**Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**Kota Cirebon**	**Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi**	**2**	**Lembaga**	**41.895.000**		**Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**Kota Cirebon**	**Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang TerAkreditasi**	**2**	**Lembaga**	**130.000.000**	
							Hasil :Terpenuhinya pembinaan LPK di Kota Cirebon	**100,00**	**persen**					Hasil :Terpenuhinya pembinaan LPK di Kota Cirebon				

2	07	03	02:02	01	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	30	Lembaga	41.895.000		Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Cirebon	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	30	Lembaga	130.000.000	1. Bimtek akreditasi lembaga 30 2. Pembinaan/kunjungan monitoring LPK sebanyak 30 LPK
2	07	03	02:03		**Kegiatan Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja**	**Kota Cirebon**	**Jumlah Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja yang terdaftar**	**1**	**Perizinan**	**30.000.000**		**Kegiatan Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja**	**Kota Cirebon**	**Jumlah Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja yang terdaftar**	**1**	**Perizinan**	**4.449.000**	
							Hasil : Tersedianya Perizinan lembaga pelatihan kerja terintegrasi	**100,00**	**persen**					Hasil : Tersedianya Perizinan lembaga pelatihan kerja terintegrasi	**100,00**	**persen**		
2	07	03	02:03	01	Sub Kegiatan Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi		Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara terintegrasi	1	Perizinan	30.000.000		Sub Kegiatan Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi		Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara terintegrasi	1	Perizinan	4.449.000	
2	07	03	02:04		**Kegiatan Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	**Kota Cirebon**	**Jumlah Perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas**	**18**	**Perusahaan**	**60.000.000**		**Kegiatan Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	**Kota Cirebon**	**Jumlah Perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas**	**16**	**Perusahaan**	**50.000.000**	
							Hasil :Terpenuhinya pembinaan produktivitas tenaga kerja	**100,00**	**persen**					Hasil :Terpenuhinya pembinaan produktivitas tenaga kerja di 5 (lima)	**100,00**	**persen**		

							di 5 (lima) perusahaan kecil							perusahaan kecil				
2	07	03	02:04	01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil		Jumlah Perusahaan Kecil Yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	18	Perusahaan	60.000.000		Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil		Jumlah Perusahaan Kecil Yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	16	Perusahaan	50.000.000	Peningkatan Produktivitas pada Perusahaan, berdasarkan permasalahan dari perusahaan. Yang nantinya ditingkatkan dari permasalahan yang ada. Bentuknya bimtek dan konsultasinya. Memiliki timnya sendiri seperti instruktur, asesornya dari Pusat. -Bimtek 3 hari - Bimkon - Gaji Non ASN 1 org
2	07	03	02:05		**Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Cirebon**	**Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas**	**1**	**Dokumen**	**160.000.000**		**Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Cirebon**	**Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas**	**1**	**Dokumen**	**131.425.000**	
							Hasil :Tersedianya Dokumen Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja	**100,00**	**persen**					Hasil :Tersedianya Dokumen Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja	**100,00**	**persen**		

2	07	03	02:05	01	Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja		Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya Saing tenaga Kerja di Tingkat daerah	1	Dokumen	160.000.000		Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja		Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya Saing tenaga Kerja di Tingkat daerah	1	Dokumen	131.425.000	- Menggunakan konsultan dan tim ahli, dokumen pengukuran produktivitas tenaga kerja tingkat kota. Kegiatannya berbentuk Kajian FGD, narasumber dari Kemnaker dan Pesertanya dari Perusahaan-perusahaan. Yang mengkajinya ada tim ahli dari Jasa Konsultan akan menghasilkan bahan untuk dibahas dalam FGD
2	07	04			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Kota Cirebon**	**Presentase tenaga kerja yang mendapatkan program Pelayanan Antar Kerja / Jumlah Pencaker yang terdaftar**	**45,00**	**persen**	**538.872.500**		**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Kota Cirebon**	**Presentase tenaga kerja yang mendapatkan program Pelayanan Antar Kerja / Jumlah Pencaker yang terdaftar**	**45,00**	**persen**	**572.188.500**	
2	07	04	2.01		**Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota**	**Kota Cirebon**	**Jumlah penempatan tenaga kerja melalui informasi pasar kerja**	**950**	**Orang**	**214.660.000**		**Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota**	**Kota Cirebon**	**Jumlah penempatan tenaga kerja melalui informasi pasar kerja**	**950**	**Orang**	**260.428.500**	

							Hasil :Terpenuhinya penempatan tenaga kerja melalui AKAD, AKAL dan AKAN dan pemberdayaan Kelompok Tenaga Kerja Mandiri	**100,00**	**persen**					Hasil :Terpenuhinya penempatan tenaga kerja melalui AKAD, AKAL dan AKAN dan pemberdayaan Kelompok Tenaga Kerja Mandiri	**100,00**	**persen**		
2	07	04	2.01	01	Sub Kegiatan Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja		Jumlah SDM pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	2	Orang	27.562.500		Sub Kegiatan Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja		Jumlah SDM pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	28	Orang	24.524.500	Bimtek petugas antar kerja
2	07	04	2.01	02	Sub Kegiatan Pelayanan Antar Kerja		Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Pelayanan AKAD dan AKL	675	Orang	27.562.500		Sub Kegiatan Pelayanan Antar Kerja		Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Pelayanan AKAD dan AKL	675	Orang	24.524.500	sosialisasi tentang penempatan tenaga kerja
2	07	04	2.01	03	Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	180	Orang	100.000.000		Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	300	Orang	142.366.000	- bimbingan jabatan untuk SMA, SMK, MA, Perguruan Tinggi - Gaji Non ASN 1 orang

2	07	04	2.01	04	Sub Kegiatan Penyelenggaran Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan		Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	3	Orang	27.562.500		Sub Kegiatan Penyelenggaran Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan		Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	3	Orang	24.524.500	
2	07	04	2.01	05	Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja		Jumlah Tenaga kerja yang Diberdayakan Melalui Perluasan Kesempatan Kerja	10	Orang	31.972.500		Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja		Jumlah Tenaga kerja yang Diberdayakan Melalui Perluasan Kesempatan Kerja	10	Orang	44.489.000	pembentukan tenaga kerja mandiri
2	07	04	02:02		**Kegiatan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Cirebon**	**Jumlah LPTKS yang mendapatkan Pengawasan dan Pengendalian**	**1**	**Lembaga**	**10.000.000**		**Kegiatan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Cirebon**	**Jumlah LPTKS yang mendapatkan Pengawasan dan Pengendalian**	**1**	**Lembaga**	**4.449.000**	
							Hasil : Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	**100,00**	**persen**					Hasil : Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	**100,00**	**persen**		
2	07	04	02:02	02	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian LPTKS		Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang berlaku	1	Lembaga	**10.000.000**		Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian LPTKS		Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang berlaku	1	Lembaga	4.449.000	

2	07	04	02:03		**Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**Kota Cirebon**	**Jumlah Data dan Informasi yang dihasilkan melalui aplikasi informasi pasar kerja online**	**1**	**Dokumen**	**159.862.500**		**Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**Kota Cirebon**	**Jumlah Data dan Informasi yang dihasilkan melalui aplikasi informasi pasar kerja online**	**1**	**Dokumen**	**184.686.500**	
							Hasil :Terpenuhinya Informasi lowongan kerja di Kota Cirebon	**100,00**	**persen**					Hasil :Terpenuhinya Informasi lowongan kerja di Kota Cirebon				
2	07	04	02:03	02	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online		Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem On line (Karie Hub)	2000	Orang	27.562.500		Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online		Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem On line (Karie Hub)	2000	Orang	24.524.500	- Sosialisasi mengenai Aplikasi Siap Kerja Semua informasi sudah tersedia dalam aplikasi siap kerja
2	07	04	02:03	03	Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/ Bursa Kerja	375	Orang	132.300.000		Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/ Bursa Kerja	375	Orang	160.162.000	- job fair - meningkatkan perusahaan peserta job fair
2	07	04	02:04		**Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota**	**Kota Cirebon**	**Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga**	**35**	**Orang**	**137.812.500**		**Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota**	**Kota Cirebon**	**Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja**	**35**	**Orang**	**122.624.500**	

							Kerja Indonesia (CTKI) yang medapatkan pelatihan							**Indonesia (CTKI) yang medapatkan pelatihan**				
							Hasil :Terpenuhinya pemberdayaan Kelompok Tenaga Kerja Mandiri	**100,00**	**persen**					Hasil :Terpenuhinya pemberdayaan Kelompok Tenaga Kerja Mandiri	**100,00**	**persen**		
2	07	04	02:04	01	Sub Kegiatan Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) /Pekerja Migran Indoonesia (PMI)		Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	5	Orang	27.562.500		Sub Kegiatan Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) /Pekerja Migran Indoonesia (PMI)		Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	5	Orang	24.524.500	- penanganan permasalahan PMI
2	07	04	02:04	03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan		Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	30	Orang	110.250.000		Sub Kegiatan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan		Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	30	Orang	98.100.000	- Honor Non ASN - pelatihan purna PMI
2	07	04	02:05		**Kegiatan Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Cirebon**	**Dokumen Penerbitan Perpanjangan IMTA**	**1**	**Dokumen**	**16.537.500**		**Kegiatan Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Cirebon**	**Dokumen Penerbitan Perpanjangan IMTA**	**0**	**Dokumen**	**-**	
							Hasil :Tersedianya Dokumen Perpanjangan Perizinan Tenaga Asing	**100,00**	**persen**									

2	07	04	02:05	01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Penerbitan Perpanjangan IMTA	1	Perizinan	16.537.500		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Penerbitan Perpanjangan IMTA	0	Perizinan	-	Perpanjangan IMTA dilakukan secara aplikasi on line yang siapkan oleh Kemnaker
								90,00	**persen**					**90,00**	**persen**		
2	07	05			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Kota Cirebon**	**Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak dibagi jumlah perusahaan**	**1,00**	**Persen**	**463.360.000**		**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Kota Cirebon**	**Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak dibagi jumlah perusahaan**	**5,00**	**Persen**	**455.777.188**	**sudah berapa perusahaan dari jumlah perusahaan yang ada**
2	07	05	2.01		**Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Cirebon**	**Jumlah Perusahaan yang memiliki sarana dan prasarana Hubungan Inustrial**	**76**	**Perusahaan**	**105.047.500**		**Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Cirebon**	**Jumlah Perusahaan yang memiliki sarana dan prasarana Hubungan Inustrial**	**76**	**Perusahaan**	**97.464.688**	
							Hasil :Terpenuhinya fasilitasi sarana hubungan industrial dan kesejahteraan pekerja	**100,00**	**persen**					Hasil :Terpenuhinya fasilitasi sarana hubungan industrial dan kesejahteraan pekerja	**100,00**	**persen**		

2	07	05	2.01	01	Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan		Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	75	Perusahaan	20.000.000		Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan		Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	75	Perusahaan	20.000.000	- pembinaan peraturan perusahaan melalui kunjungan perusahaan -
2	07	05	2.01	02	Sub Kegiatan Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan		Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	1	Perusahaan	20.000.000		Sub Kegiatan Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan		Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	1	Perusahaan	12.417.188	
2	07	05	2.01	03	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan		Jumlah Data dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1	Laporan	65.047.500		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan		Jumlah Data dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1	Laporan	65.047.500	- sosialisasi tentang PKWT

2	07	05	02:02		**Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Cirebon**	**Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama**	**10**	**Perkara**	**358.312.500**		**Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Cirebon**	**Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama**	**10**	**Perkara**	**358.312.500**	
							Hasil :Terpenuhinya fasilitasi pencegahan perselisihan Hubungan Industial dan mogok kerja	**100,00**	**persen**				Hasil :Terpenuhinya fasilitasi pencegahan perselisihan Hubungan Industial dan mogok kerja	**100,00**	**persen**		
2	07	05	02:02	01	Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Indikator: Jumlah Perselisihan yang Dicegah	8	Perkara	77.175.000		Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Indikator: Jumlah Perselisihan yang Dicegah	8	Perkara	77.175.000	- sosialisasi mengenai pencegahan perselisihan
2	07	05	02:02	02	Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	10	Perkara	33.075.000		Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	10	Perkara	33.075.000	

2	07	05	02:02	03	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh serta Non Afiliasi		Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	10 dan 1	Asosiasi Serikat Pekerja	27.562.500		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh serta Non Afiliasi		Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	1 dan 10	Asosiasi Serikat Pekerja	27.562.500	- APINDO - 10 Serikat pekerja
2	07	05	02:02	04	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1	Lembaga	165.375.000		Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1	Lembaga	165.375.000	
2	07	05	02:02	05	Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	3.200	Orang	55.125.000		Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	38.200	Orang	55.125.000	- capaian peserta jamsostek april 2024 = 38.080
2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Kota Cirebon**	**Nilai IKM Perangkat Daerah**	**87,50**	**poin**	**8.564.001.120**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Kota Cirebon**	**Nilai IKM Perangkat Daerah**	**88,00**	**poin**	**8.696.706.996**	capaian tahun 2024 = 87,75 poin
2	07	01	2.01		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kota Cirebon**	**Keluaran: Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**5**	**jenis**	**108.802.005**		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kota Cirebon**	**Keluaran: Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**5**	**jenis**	**152.356.000**	

							Hasil: Tersediany a informasi perencanaa n, penganggar an, dan evaluasi sebagai bahan dan acuan pelaksanaa n kegiatan perangkat daerah	**10 0, 00**	**perse n**					**Hasil: Tersedianya informasi perencanaan, penganggara n, dan evaluasi sebagai bahan dan acuan pelaksanaan kegiatan perangkat daerah**	**10 0, 00**	**perse n**		
2	07	01	2 . 0 1	01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah	4	dokum en	26.315.730		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	dokum en	27.500.000	1. SOP 2. dokumen Renja 3. FPD 4. dokumen RKT 5. Renstra 6. Renja Perubahan
2	07	01	2 . 0 1	02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	dokum en	2.247.000		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	dokum en	2.247.000	
2	07	01	2 . 0 1	03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	dokum en	2.247.000		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	dokum en	2.247.000	

2	07	01	2.01	04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	dokumen	2.247.000		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	dokumen	2.247.000	
2	07	01	2.01	05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	1	dokumen	3.115.200		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	1	dokumen	3.115.000	
2	07	01	2.01	06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8	laporan	4.054.575		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8	laporan	40.000.000	gaji non ASN 1 orang
2	07	01	2.01	07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	laporan	68.575.500		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19	laporan	75.000.000	- gaji non asn 2 orang

2	07	01	2.02		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kota Cirebon**	**Keluaran : Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah**	**29**	**jenis**	**5.140.954.540**		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kota Cirebon**	**Keluaran : Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah**	**29**	**jenis**	**5.126.132.812**	
							Hasil : Tersediany a informasi keuangan perangkat daerah sebagai bahan audit keuangan perangkat daerah	**100,00**	**persen**					**Hasil : Tersedianya informasi keuangan perangkat daerah sebagai bahan audit keuangan perangkat daerah**	**100,00**	**persen**		
2	07	01	2.02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26	orang	5.093.550.000		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30	orang	5.093.550.000	kebutuhan disesuaikan dengan jumlah orang
2	07	01	2.02	05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	laporan	4.861.900		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	laporan	12.582.812	

2	07	01	2.02	07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semeteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semeteran SKPD	2	laporan	42.542.640		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semeteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semeteran SKPD	28	laporan	20.000.000	
2	07	01	2.03		**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kota Cirebon**	**Keluaran: Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**1**	**jenis**	**23.674.200**		**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kota Cirebon**	**Keluaran: Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**1**	**jenis**	**23.674.000**	
							Hasil: Tersedianya data dan informasi barang milik daerah pada perangkat daerah sebagai bahan audit	**100,00**	**persen**					**Hasil: Tersedianya data dan informasi barang milik daerah pada perangkat daerah sebagai bahan audit**	**100,00**	**persen**		
2	07	01	2.03	02	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	dokumen	23.674.200		Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	dokumen	23.674.000	

2	**07**	**01**	**2.04**		**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kota Cirebon**	**Keluaran: Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**1**	**jenis**	**10.607.584**		**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kota Cirebon**	**Keluaran: Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**1**	**jenis**	**10.607.584**	
							Hasil: Tersedianya data dan informasi barang milik daerah pada perangkat daerah sebagai bahan audit							Hasil: Tersedianya data dan informasi barang milik daerah pada perangkat daerah sebagai bahan audit				
2	07	01	2.03	02	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	jenis	10.607.584		Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	jenis	10.607.584	
2	07	01	2.05		**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kota Cirebon**	**Keluaran: Pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian**	**60**	**orang**	**185.635.690**		**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kota Cirebon**	**Keluaran: Pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian**	**60**	**orang**	**160.000.000**	
							Hasil: Persentase pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi	**100,00**	**persen**					**Hasil: Persentase pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian**	**100,00**	**persen**		

							kepegawaian											
2	07	01	2.05	01	Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasaranan Disiplin Pegawai		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	5	unit	70.849.900		Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasaranan Disiplin Pegawai		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2	unit	70.000.000	kegiatan olahraga dan rohani
2	07	01	2.05	02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5	paket	91.633.290		Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5	paket	75.000.000	pengadaan pakaian PDH,Pakaian Hitam Putih,Batik, Olahraga
2	07	01	2.05	10	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50	orang	23.152.500		Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50	orang	15.000.000	
2	07	01	2.06		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kota Cirebon**	**Keluaran: Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**9**	**jenis**	**662.187.180**		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kota Cirebon**	**Keluaran: Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**9**	**jenis**	**640.020.000**	
							Hasil: Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**100,00**	**persen**					**Hasil: Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100,00**	**persen**		

2	07	01	2.06	01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	paket	20.837.175		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	paket	21.000.000	-gedung kantor - gedung UPT
2	07	01	2.06	02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	paket	60.767.175		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	paket	60.750.000	ATK
2	07	01	2.06	03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	paket	11.576.250		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	paket	11.576.000	
2	07	01	2.06	04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	paket	7.998.060		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	paket	8.000.000	- gas - apar
2	07	01	2.06	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	paket	18.305.000		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	paket	18.305.000	
2	07	01	2.06	06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	dokumen	256.314.160		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	dokumen	256.500.000	iklan dan koran

2	07	01	2.06	08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	laporan	48.600.600		Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	laporan	48.600.000	setiap bulan
2	07	01	2.06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	laporan	195.289.700		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	laporan	195.289.000	
2	07	01	2.06	10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	dokumen	42.499.060		Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	dokumen	20.000.000	honor non asn 1 orang
2	**07**	**01**	**2.07**		**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kota Cirebon**	**Keluaran: Dokumen Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**5**	**jenis**	**1.217.408.965**		**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kota Cirebon**	**Keluaran: Dokumen Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**5**	**jenis**	**815.647.600**	
							Hasil: Terpenuhinya Jasa Penunjang Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan tepat waktu	**100,00**	**persen**					**Hasil: Terpenuhinya Jasa Penunjang Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan tepat waktu**	**100,00**	**persen**		
2	**07**	**01**	**2.07**	01	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	1	unit	585.635.690		Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	unit	48.907.550	

							Jabatan yang Disediakan								yang Disediakan				
2	**07**	**01**	**2.07**	02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	unit	226.012.500		Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	unit	85.000.000	jumlah kendaraan operasional yang harus dihapuskan = 7 kendaraan
2	**07**	**01**	**2.07**	05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebelair		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	paket	46.305.000		Sub Kegiatan Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	unit	81.740.050	meja dan kursi kantor
2	**07**	**01**	**2.07**	06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	paket	145.730.900		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7	unit	200.000.000	mesin las fabrikasi
2	**07**	**01**	**2.07**	10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7	unit	164.112.375		Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7	unit	200.000.000	laptop pc printer scanner ac TV
2	**07**	**01**	**2.07**	11	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	unit	49.612.500		Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	unit	200.000.000	

2	07	01	2.08		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Cirebon**	**Keluaran: Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah**	**3**	**jenis**	**607.674.890**		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Cirebon**	**Keluaran: Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah**	**3**	**jenis**	**616.185.000**	
							Hasil: Terpenuhinya Jasa Penunjang Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan tepat waktu	**100,00**	**persen**					**Hasil: Terpenuhinya Jasa Penunjang Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan tepat waktu**	**100,00**	**persen**		
2	07	01	2.08	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	laporan	4.859.190		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	laporan	5.000.000	
2	07	01	2.08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	116.630.700		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	125.000.000	
2	07	01	2.08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	laporan	486.185.000		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	laporan	486.185.000	

2	07	01	2.09		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Cirebon**	**Keluaran: Dokumen Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**5**	**jenis**	**617.663.650**		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Cirebon**	**Keluaran: Dokumen Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**5**	**jenis**	**1.152.084.000**	
							Hasil: Terpeliharanya Barang Milik Daerah sebagai Fasilitasi Kinerja ASN pada Perangkat Daerah	**100,00**	**persen**					**Hasil: Terpeliharanya Barang Milik Daerah sebagai Fasilitasi Kinerja ASN pada Perangkat Daerah**	**100,00**	**persen**		
2	07	01	2.09	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	unit	67.630.650		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	unit	67.630.000	
2	07	01	2.09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	16	unit	234.454.500		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13	unit	234.454.000	Roda 4 = 3 unit, Roda 2 = 9 unit

							Perizinannya											
2	07	01	2.09	06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8	unit	46.305.000		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8	unit	50.000.000	
2	07	01	2.09	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	unit	230.686.000		Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	unit	400.000.000	
2	07	01	2.09	10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	38.587.500		Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	400.000.000	taman/halaman

BAB V
PENUTUP

Rencana kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon Tahun 2025 Perencanaan 2026 adalah dokumen perencanaan Dinas Tenaga Kerja untuk periode 1 (satu) tahun dan merupakan tahun ke-1 dari pelaksanaan Renstra Dinas Tahun 2025-2029. Rencana kerja ini berisi program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pagu indikatif dan prakiraan maju (Tahun 2027) berdasarkan Renstra Dinas dan RPJMD Kota Cirebon Tahun 2025-2029.

Rencana Kerja yang disusun secara tahunan ini bertujuan sebagai pedoman bagi penyusunan APBD Kota Cirebon Tahun Perencanaan 2026 serta menjadi landasan bagi seluruh pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon untuk mencapai tingkat kinerja yang lebih baik dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon maupun Visi Misi Pemerintah Kota Cirebon pada umumnya.

Harapan kami, dengan tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2025 Perencanaan 2026 ini dapat mengakomodiri semua program dan kegiatan serta mengoptimalkan penggunaan uang negara yang dibelanjakan, sehingga outputnya dapat diukur dengan berlandaskan asas manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan dalam rangka efektivitas aparatur pemerintahan.

Cirebon, Juni 2025
KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KOTA CIREBON



Drs. AGUS SUHERMAN, SH.MH
NIP. 19670804 198803 1 011

LAMPIRAN

Table 2.7
Renstra 2025-2029
Program dan kegiatan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	KODE REKENING					BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT		BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
												2026		2027		2028		2029		2030		
												TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
								[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]
			2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					15.543.196.000		16.354.730.000		17.287.692.000		18.513.173.000		19.169.730.000	
			2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					15.543.196.000		16.354.730.000		17.287.692.000		18.513.173.000		19.169.730.000	
Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja		**Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja**								Juta Rupiah/Tenaga Kerja	47,92	50,84	15.543.196.000	52,36	16.354.730.000	53,93	17.287.692.000	55,55	18.513.173.000	57,22	19.169.730.000	
	Meningkatnya Kompetensi dan Kualifikasi Tenaga Kerja	**Presentase Pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi**								Persen	52,15	52,35	554.000.000	52,45	528.500.000	52,55	609.000.000	52,65	989.500.000	52,75	770.000.000	

			2	**07**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu pada RTKD**	**Persen**	**53,85**	**53,85**	**150.000.000**	**54,00**	**55.000.000**	**55,00**	**60.000.000**	**56,00**	**365.000.000**	**57,00**	**70.000.000**	
			2	07	02	2.01		Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD)	Dokumen	2	2	150.000.000	1	55.000.000	1	60.000.000	2	365.000.000	1	70.000.000
									Hasil : Tersedianya Informasi Tenaga Kerja Makro dan Mikro tenaga kerja Kota Cirebon												
			2	07	02	2.01	0001	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana tenaga Kerja makro	Dokumen	1	1	100.000.000	n/a	n/a	n/a	n/a	1	300.000.000	n/a	n/a
									Hasil : Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro												
			2	07	02	2.01	0003	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	Orang	20	25	50.000.000	30	55.000.000	35	60.000.000	40	65.000.000	45	70.000.000
									Hasil : Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro												
			2	**07**	**03**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya**	**Persen**	**0,893**	**0,963**	**404.000.000**	**0,998**	**473.500.000**	**1,033**	**549.000.000**	**1,068**	**624.500.000**	**1,103**	**700.000.000**	
			2	07	03	2.01		Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan beradasarkan Unit Kompetensi	Persentase alumni pelatihan yang tersertifikati kompeten	Persen	80	83	115.000.000	86	165.000.000	89	225.000.000	92	285.000.000	95	345.000.000

								Jumlah tenaga kerja Bersertifikat Keahlian	Orang													
								Hasil :Terpenuhinya kebutuhan pengembangan kemampuan pencari kerja														
			2	07	03	2.01	0002	Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/ Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun-n	Lembaga	n/a	1	Rp15.000.000	3	Rp20.000.000	4	Rp25.000.000	5	Rp30.000.000	6	Rp35.000.000	
								Hasil : Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja														
			2	07	03	2.01	0004	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi pad Tahun - n	Orang	10	10	60.000.000	12	75.000.000	14	100.000.000	16	125.000.000	18	150.000.000	
								Hasil : Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi														
			2	07	03	2.01	0005	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Lembaga	n/a	1	Rp25.000.000	2	Rp50.000.000	3	Rp75.000.000	4	Rp100.000.000	5	Rp125.000.000	

								Hasil : Tersedianya Sarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas													
			2	07	03	2.01	0006	Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Jumlah Kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n	Kesepakatan	n/a	1	Rp15.000.000	3	Rp20.000.000	4	Rp25.000.000	5	Rp30.000.000	6	Rp35.000.000	
									Hasil : Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas												
			2	07	03	2,02		Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Memiliki Program Terakreditasi	Lembaga	2	2	Rp64.000.000	2	Rp68.000.000	2	Rp72.000.000	2	Rp76.000.000	2	Rp80.000.000	
									Hasil :Terpenuhinya pembinaan LPK di Kota Cirebon												
			2	07	03	2,02	0001	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Lembaga	23	32	Rp64.000.000	34	Rp68.000.000	36	Rp72.000.000	40	Rp76.000.000	42	Rp80.000.000	
									Hasil : Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta												
			2	07	03	2,03		Kegiatan Perizinan dan Pendaftaran	Jumlah Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja yang terdaftar	Perizinan	n/a	1	Rp10.000.000	3	Rp12.500.000	4	Rp15.000.000	5	Rp17.500.000	6	Rp20.000.000	

							Lembaga Pelatihan Kerja														
							-	Hasil : Tersedianya Perizinan lembaga pelatihan kerja terintegrasi													
			2	07	03	2,03	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara terintegrasi	Perizinan	n/a	1	Rp10.000.000	3	Rp12.500.000	4	Rp15.000.000	5	Rp17.500.000	6	Rp20.000.000	
								Hasil : Tersedianya Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi														
			2	07	03	2,04		Kegiatan Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	Perusahaan	n/a	16	Rp60.000.000	18	Rp68.000.000	20	Rp72.000.000	22	Rp76.000.000	24	Rp80.000.000	
								Hasil :Terpenuhinya pembinaan produktivitas tenaga kerja di 5 (lima) perusahaan kecil														
			2	07	03	2,04	0001	Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil Yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Perusahaan	n/a	16	Rp60.000.000	18	Rp68.000.000	20	Rp72.000.000	22	Rp76.000.000	24	Rp80.000.000	
								Hasil : Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil														
			2	07	03	2,05		Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas	Dokumen	n/a	1	Rp155.000.000	1	Rp160.000.000	1	Rp165.000.000	1	Rp170.000.000	1	Rp175.000.000	
								Hasil :Tersedianya Dokumen Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja														

			2	07	03	2,05	0001	Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya Saing tenaga Kerja di Tingkat daerah	Dokumen	n/a	1	Rp155.000.000	1	Rp160.000.000	1	Rp165.000.000	1	Rp170.000.000	1	Rp175.000.000	
									Hasil : Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja													
	Meningkatmya Penempatan Tenaga Kerja	**Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kab/kota dalam 1 daerah provinsi**								Persen	56,94	57,02	780.502.000	57,1	858.688.000	57,18	961.338.000	57,26	1.074.488.000	57,34	1.155.597.000	
			2	**07**	**04**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam dan Luar Negeri**	**Persen**	**40**	**44**	**Rp780.502.000**	**45**	**Rp858.688.000**	**46**	**Rp961.338.000**	**47**	**Rp1.074.488.000**	**48**	**Rp1.155.597.000**	
			2	07	04	2.01		Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui informasi pasar kerja	Orang	1526	1132	Rp362.689.000	1189	Rp400.250.000	1246	Rp436.000.000	1298	Rp471.750.000	1355	Rp507.500.000	

							-	Hasil :Terpenuhinya penempatan tenaga kerja melalui AKAD, AKAL dan AKAN dan pemberdayaan Kelompok Tenaga Kerja Mandiri												
			2	07	04	2.01	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah SDM pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	Orang	26	35	Rp37.563.000	37	Rp41.650.000	39	Rp45.300.000	36	Rp48.950.000	38	Rp52.340.000	
									Hasil : Tersedianya SDM Pelayanan antar Kerja (Pengantar Kerja dan Petugas antar Kerja)	Orang	26										
			2	07	04	2.01	0002	Sub Kegiatan Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Pelayanan AKAD dan AKL	Orang	625	700	Rp37.563.000	725	Rp41.650.000	750	Rp45.800.000	775	Rp49.950.000	800	Rp53.840.000	
									Hasil : Terwujudnya Pelayanan antar Kerja	Orang	625										
			2	07	04	2.01	0003	Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang	90	350	Rp180.000.000	375	Rp191.650.000	400	Rp203.300.000	425	Rp214.950.000	450	Rp227.640.000	
									Hasil : Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Orang	90										
			2	07	04	2.01	0004	Sub Kegiatan Penyelenggaran Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	Orang	22	27	Rp37.563.000	30	Rp43.650.000	33	Rp48.300.000	36	Rp52.950.000	39	Rp57.340.000	
									Hasil : Terselenggaranya Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Orang	22										
			2	07	04	2.01	0005	Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga kerja yang Diberdayakan Melalui Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	n/a	20	Rp70.000.000	22	Rp81.650.000	24	Rp93.300.000	26	Rp104.950.000	28	Rp116.340.000	

								Hasil : Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	n/a											
			2	07	04	2,02		Kegiatan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LPTKS yang mendapatkan Pengawasan dan Pengendalian	Lembaga	n/a	2	Rp10.000.000	2	Rp10.250.000	2	Rp10.763.000	2	Rp11.302.000	2	Rp11.867.000	
									Hasil : Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian LPTKS												
			2	07	04	2,02	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	Lembaga	n/a	1	Rp5.000.000	1	Rp5.000.000	1	Rp5.250.000	1	Rp5.513.000	1	Rp5.789.000	
									Hasil : Tersedianya Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi												
			2	07	04	2,02	0002	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang berlaku	Lembaga	n/a	1	Rp5.000.000	1	Rp5.250.000	1	Rp5.513.000	1	Rp5.789.000	1	Rp6.078.000	
									Hasil : Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian LPTKS												
			2	07	04	2,03		Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Data dan Informasi yang dihasilkan melalui aplikasi informasi pasar kerja online	Dokumen	1	1	Rp235.000.000	1	Rp252.000.000	1	Rp267.450.000	1	Rp283.373.000	1	Rp299.792.000	
									Hasil :Terpenuhinya Informasi lowongan kerja di Kota Cirebon												

			2	07	04	2,03	0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Inormasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Dokumen	1	1	Rp25.000.000	1	Rp28.000.000	1	Rp29.000.000	1	Rp30.000.000	1	Rp31.000.000	
									Hasil : Tersedianya Data dan Informasi Pencari Kerja yang Memanfaatkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online													
			2	07	04	2,03	0002	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem On line (Karie Hub)	Orang	n/a	2000	Rp30.000.000	2050	Rp35.000.000	2100	Rp40.000.000	2150	Rp45.000.000	2200	Rp50.000.000	
									Hasil : Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online													
			2	07	04	2,03	0003	Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/ Bursa Kerja	Orang	325	375	Rp180.000.000	400	Rp189.000.000	425	Rp198.450.000	450	Rp208.373.000	475	Rp218.792.000	
									Hasil : Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja													
			2	07	04	2,04		Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang medapatkan perlindungan	Orang	38	42	Rp172.813.000	47	Rp196.188.000	59	Rp247.125.000	73	Rp308.063.000	79	Rp336.438.000	
								-	Hasil :Terpenuhinya pemberdayaan Kelompok Tenaga Kerja Mandiri													
			2	07	04	2,04	0001	Sub Kegiatan Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) /Pekerja Migran Indoonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	9	5	Rp27.563.000	7	Rp38.588.000	10	Rp55.125.000	13	Rp71.663.000	15	Rp82.688.000	

								Hasil : Terlaksananya Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)												
			2	07	04	2,04	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Terpadu pad Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI/PMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	Orang	9	7	Rp35.000.000	8	Rp40.000.000	9	Rp45.000.000	12	Rp60.000.000	14	Rp70.000.000	
									Hasil : Tersedianya Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran												
			2	07	04	2,04	0003	Sub Kegiatan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	Orang	20	30	Rp110.250.000	32	Rp117.600.000	40	Rp147.000.000	48	Rp176.400.000	50	Rp183.750.000	
									Hasil : Terlaksananya Pemberdayaan PMI Purna Penempatan												
			2	07	04	3,01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui informasi pasar kerja	Dokumen	n/a	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
									Persentase Penyandang Disabilias Bekerja Di Sektor Formal	Persen	2,50%	2,96%		3,19%		3,42%		3,64%		4,10%		
									Hasil :Terpenuhinya penempatan tenaga kerja melalui AKAD, AKAL dan AKAN dan pemberdayaan Kelompok Tenaga Kerja Mandiri												
			2	07	04	3,01	0008	Sub Kegiatan Pemberian penghargaan kepada perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas	Jumlah perusahaan yang Mendapatkan Penghargaan karena mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas	Perusahaan	n/a	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	

								Hasil : Terlaksananya Pemberian penghargaan kepada perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas												
			2	07	04	3,01	0009	Sub Kegiatan Pemberdayaan Bagi OAP Melalui Kegiatan Kewirausahaan	Jumlah OAP Yang Diberdayakan melaui Kegiatan Kewirausahaan	Orang	n/a	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
									Hasil : Terselenggaranya Pemberdayaan Bagi OAP Melalui Kegiatan Kewirausahaan												
			2	07	04	3,01	0010	Sub Kegiatan Koordinasi ke Perusahaan dalam Penempatan OAP pada semua jenis pekerjaan dengan memperhatikan kompetensi Sesuai Kebutuhan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi ke Perusahaan dalam Penempatan OAP pada semua jenis pekerjaan dengan memperhatikan kompetensi Sesuai Kebutuhan Yang Telah Dilaksanakan	Dokumen	n/a	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
									Hasil : Terlaksananya Koordinasi ke Perusahaan dalam Penempatan OAP pada semua jenis pekerjaan dengan memperhatikan kompetensi Sesuai Kebutuhan												
			2	07	04	4,05		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kerja Asing yang Melakukan Perpanjangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing di 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Orang	0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	

								Hasil : Terlaksananya penerbitan perpanjangan penggunaan tenaga kerja asing di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													
			2	07	04	4,05	0002	Sub Kegiatan Validasi Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota	Jumlah Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota Yang Divalidasi	SKRD	0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	
								Hasil : Terlaksananya Validasi Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota													
	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	**Persentase perselisihan HI yang diselesaikan melalui PB oleh mediator**								Persen	96,67	97,25	454.563.000	97,50	477.292.000	97,75	501.157.000	98,00	526.216.000	98,25	552.526.000	

			2	**07**	**05**			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial**	**Orang**	**41.494**	**41.660**	**454.563.000**	**41.743**	**477.292.000**	**41.827**	**501.157.000**	**41.911**	**526.216.000**	**41.994**	**552.526.000**	
			2	07	05	2,01		Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang memiliki sarana dan prasarana Hubungan Industrial	Perusahaan	66	76 Perusahaan	96.289.000	81 Perusahaan	101.104.000	86 Perusahaan	106.160.000	91 Perusahaan	111.467.000	96 Perusahaan	117.041.000	
									Hasil : Meningkatnya jumlah perusahaan yang memiliki sarana prasana hubungan industrial													
			2	07	05	2,01	0001	Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahaan	65	75 Perusahaan	15.750.000	80 Perusahaan	16.538.000	85 Perusahaan	17.365.000	90 Perusahaan	18.233.000	95 Perusahaan	19.145.000	
									Hasil : Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online													
			2	07	05	2,01	0002	Sub Kegiatan Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Perusahaan	1	1 Perusahaan	10.500.000	1 Perusahaan	11.025.000	1 Perusahaan	11.577.000	1 Perusahaan	12.155.000	1 Perusahaan	12.763.000	
									Hasil : Terlaksananya Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan													

			2	07	05	2,01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan	1	1 laporan	70.039.000	1 laporan	73.541.000	1 laporan	77.218.000	1 laporan	81.079.000	1 laporan	85.133.000	
									Hasil : Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan												
			2	07	05	2,02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	Persen	100 %	100%	358.274.000	100 %	376.188.000	100 %	394.997.000	100 %	414.749.000	100%	435.485.000	
									Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Persen	96,93%										
									Hasil : Meningkatnya perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama												
			2	07	05	2,02	0001	Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara	8 Perkara	8 perkara	77.175.000	8 perkara	81.034.000	8 perkara	85.086.000	8 perkara	89.340.000	9 perkara	93.807.000	

							(Satu) Daerah Kabupaten/Kota															
								Hasil : Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													
			2	07	05	2,02	0002	Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Perkara	10 Perkara	10 perkara	33.035.000	10 perkara	34.687.000	10 perkara	36.421.000	11 perkara	38.243.000	12 perkara	40.155.000	
								Hasil : Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													
			2	07	05	2,02	0003	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Asosisasi dan Serikat Pekerja	1 asosiasi 10 serikat	1 asosiasi 10 serikat	27.563.000	1 asosiasi 10 serikat	28.941.000	1 asosiasi 10 serikat	30.388.000	1 asosiasi 10 serikat	31.908.000	2 asosiasi 10 serikat	33.503.000	

							Buruh serta Non Afiliasi															
								Hasil : Terselenggaranya Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi													
			2	07	05	2,02	0004	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Lembaga	1 Lembaga	1 lembaga	165.375.000	1 lembaga	173.644.000	1 lembaga	182.326.000	1 lembaga	191.443.000	1 lembaga	201.015.000	
								Hasil : Terlaksananya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota													
			2	07	05	2,02	0005	Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosisal Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	3000 Orang	3.100 orang	55.126.000	3.200 orang	57.882.000	3.300 orang	60.776.000	3.400 orang	63.815.000	3.500 orang	67.005.000	
								Hasil : Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja													

	Meningkatnya kualitas tata kelola dan dukungan administratif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	**Nilai Sakip Perangkat Daerah**							Poin	77,75	77,95	8.584.131.000	78,05	8.990.250.000	78,15	9.416.197.000	78,25	9.822.969.000	78,35	10.291.607.000	
			2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Indeks Kematangan Organisasi**	**Poin**	**n/a**	**47,00**	**8.584.131.000**	**47,25**	**8.990.250.000**	**47,50**	**9.416.197.000**	**47,75**	**9.822.969.000**	**48,00**	**10.291.607.000**	
			2	07	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran: Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jenis	5	5	108.804.000	5	114.247.000	5	119.961.000	5	125.961.000	5	132.264.000	
			.						Hasil: Tersedianya informasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi sebagai bahan dan acuan pelaksanaan kegiatan perangkat daerah													
			2	07	01	2.01	0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	5	26.316.000	5	27.632.000	5	29.014.000	5	30.465.000	5	31.989.000	

								Hasil : Terpenuhinya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			2	07	01	2.01	0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	2.247.000	1	2.360.000	1	2.478.000	1	2.602.000	1	2.733.000	
									Hasil : Terpenuhinya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									-					
			2	07	01	2.01	0003	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	2.247.000	1	2.360.000	1	2.478.000	1	2.602.000	1	2.733.000	
									Hasil : Terpenuhinya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			2	07	01	2.01	0004	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	2.247.000	1	2.360.000	1	2.478.000	1	2.602.000	1	2.733.000	
									Hasil : Terpenuhinya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			2	07	01	2.01	0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Dokumen	1	1	3.116.000	1	3.272.000	1	3.436.000	1	3.608.000	1	3.789.000	
									Hasil : Terpenuhinya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

			2	07	01	2.01	0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	8	8	4.055.000	8	4.258.000	8	4.471.000	8	4.695.000	8	4.930.000	
									Hasil : Terpenuhinya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			2	07	01	2.01	0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	10	10	68.576.000	10	72.005.000	10	75.606.000	10	79.387.000	10	83.357.000
									Hasil : Terpenuhinya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			2	07	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jenis	3	3	5.140.955.000	3	5.398.005.000	3	5.667.907.000	3	5.951.304.000	3	6.248.871.000
									Hasil : Tersedianya informasi keuangan perangkat daerah sebagai bahan audit keuangan perangkat daerah													
			2	07	01	2.02	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	26	28	5.093.550.000	28	5.348.228.000	28	5.615.640.000	28	5.896.422.000	28	6.191.244.000
									Hasil : Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													

			2	07	01	2.02	0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	2	4.862.000	2	5.106.000	2	5.362.000	2	5.631.000	2	5.913.000	
									Hasil : Terpenuhinya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
			2	07	01	2.02	0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semeteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semeteran SKPD	Laporan	28	28	42.543.000	28	44.671.000	28	46.905.000	28	49.251.000	28	51.714.000	
									Hasil : Terpenuhinya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD													
			2	07	01	2.03		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Keluaran: Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jenis	1	2	33.800.000	2	35.484.000	2	37.227.000	2	39.033.000	2	40.904.000	
									Hasil: Tersedianya data dan informasi barang milik daerah pada perangkat daerah sebagai bahan audit													
			2	07	01	2.03	0002	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	23.675.000	1	24.859.000	1	26.102.000	1	27.408.000	1	28.779.000	
									Hasil : Terpenuhinya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD													

			2	07	01	2,03	004	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	1	10.125.000	1	10.625.000	1	11.125.000	1	11.625.000	1	12.125.000	
									Hasil : Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD													
			2	07	01	2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Keluaran: Pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian	Orang	26	60	185.637.000	70	194.920.000	80	204.667.000	90	214.902.000	100	225.648.000	
									Hasil: Persentase pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian													
			2	07	01	2.05	0001	Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasaranan Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	2	5	70.850.000	5	74.393.000	5	78.113.000	5	82.019.000	5	86.120.000	
									Hasil : Terpenuhinya Peningkatan Sarana dan Prasaranan Disiplin Pegawai													
			2	07	01	2.05	0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	5	5	91.634.000	5	96.216.000	5	101.027.000	5	106.079.000	5	111.383.000	
									Hasil : Terpenuhinya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya													
			2	07	01	2.05	0010	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	50	50	23.153.000	50	24.311.000	50	25.527.000	50	26.804.000	50	28.145.000	
									Hasil : Terpenuhinya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan													

			2	07	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Keluaran: Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jenis	9	9	662.193.000	9	695.306.000	9	730.075.000	9	766.583.000	9	804.916.000	
									Hasil: Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah													
			2	07	01	2.06	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jenis	2	2	20.838.000	2	21.880.000	2	22.974.000	2	24.123.000	2	25.330.000	
									Hasil : Terpenuhinya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			2	07	01	2.06	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	60.768.000	1	63.807.000	1	66.998.000	1	70.348.000	1	73.866.000	
									Hasil : Terpenuhinya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			2	07	01	2.06	0003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	2	11.577.000	2	12.156.000	2	12.764.000	2	13.403.000	2	14.074.000	
									Hasil : Terpenuhinya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			2	07	01	2.06	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	7.999.000	2	8.399.000	2	8.819.000	2	9.260.000	2	9.723.000	
									Hasil : Terpenuhinya Penyediaan Bahan Logistik Kantor													

			2	07	01	2.06	0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	18.305.000	2	19.221.000	2	20.183.000	2	21.193.000	2	22.253.000	
									Hasil : Terpenuhinya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			2	07	01	2.06	0006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	2	256.315.000	2	269.131.000	2	282.588.000	2	296.718.000	2	311.554.000	
									Hasil : Terpenuhinya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			2	07	01	2.06	0008	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	48.601.000	12	51.032.000	12	53.584.000	12	56.264.000	12	59.078.000	
									Hasil : Terpenuhinya Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			2	07	01	2.06	0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	195.290.000	12	205.055.000	12	215.308.000	12	226.074.000	12	237.378.000	
									Hasil : Terpenuhinya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			2	07	01	2.06	0010	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	42.500.000	1	44.625.000	1	46.857.000	1	49.200.000	1	51.660.000	
									Hasil : Terpenuhinya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														

			2	07	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Keluaran: Dokumen Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jenis	5	6	1.217.410.000	6	1.253.685.000	6	1.291.423.000	6	1.290.698.000	6	1.331.588.000	
									Hasil: Terpenuhinya Jasa Penunjang Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan tepat waktu													
			2	07	01	2.07	01	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	1	585.635.000	1	590.635.000	1	595.635.000	1	560.635.000	1	565.635.000	
									Terpenuhinya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			2	07	01	2.07	02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	5	1	226.013.000	1	237.314.000	1	249.180.000	1	261.639.000	1	274.721.000	
									Terpenuhinya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			2	07	01	2.07	05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebelair	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	2	2	46.305.000	2	48.305.000	2	50.305.000	2	52.305.000	2	54.305.000	
									Terpenuhinya Pengadaan Mebelair													
			2	07	01	2.07	06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	7	145.731.000	7	153.018.000	7	160.669.000	7	168.703.000	7	177.139.000	
									Terpenuhinya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													

			2	07	01	2.07	10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	7	7	164.113.000	7	172.319.000	7	180.935.000	7	189.982.000	7	199.482.000	
									Terpenuhinya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			2	07	01	2.07	11	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	49.613.000	1	52.094.000	1	54.699.000	1	57.434.000	1	60.306.000	
									Terpenuhinya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			2	07	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran: Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	Jenis	3	3	607.667.000	3	638.052.000	3	669.956.000	3	703.455.000	3	738.629.000	
									Hasil: Terpenuhinya Jasa Penunjang Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan tepat waktu													
			2	07	01	2.08	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	2	4.851.000	2	5.094.000	2	5.349.000	2	5.617.000	2	5.898.000	
									Hasil : Terpenuhinya Penyediaan Jasa Surat Menyurat													

			2	07	01	2.08	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	116.631.000	12	122.463.000	12	128.587.000	12	135.017.000	12	141.768.000	
									Hasil : Terpenuhinya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			2	07	01	2.08	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2	2	486.185.000	2	510.495.000	2	536.020.000	2	562.821.000	2	590.963.000	
									Hasil : Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			2	07	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran: Dokumen Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jenis	5	6	627.665.000	6	660.551.000	6	694.981.000	6	731.033.000	6	768.787.000	
									Hasil: Terpeliharanya Barang Milik Daerah sebagai Fasilitasi Kinerja ASN pada Perangkat Daerah													
			2	07	01	2.09	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	67.631.000	1	71.013.000	1	74.564.000	1	78.293.000	1	82.208.000	

								Hasil : Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			2	07	01	2.09	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	16	16	234.455.000	16	246.178.000	16	258.487.000	16	271.412.000	16	284.983.000	
									Hasil : Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
				07	01	2.09	0005	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	5	5	10.000.000	5	12.000.000	5	14.000.000	5	16.000.000	5	18.000.000	
									Hasil : Terlaksananya Pemeliharaan Mebel													
			2	07	01	2.09	0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	8	9	46.305.000	9	48.621.000	9	51.053.000	9	53.606.000	9	56.287.000	
									Hasil : Terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			2	07	01	2.09	0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	230.686.000	2	242.221.000	2	254.333.000	2	267.050.000	2	280.403.000	

								Hasil : Terpenuhinya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			2	07	01	2.09	0010	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	38.588.000	1	40.518.000	1	42.544.000	1	44.672.000	1	46.906.000	
									Hasil : Terpenuhinya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													

2	**07**	**03**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya**	**Persen**	**0,893**	**0,963**	**5.170.000.000**	**0,998**	**5.500.000.000**	**1,033**	**5.800.000.000**	**1,068**	**6.100.000.000**	**1,103**	**6.400.000.000**	
2	07	03	2.01		Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan beradasarkan Unit Kompetensi	Presentase alumni pelatihan yang tersertifikati kompeten	Persen	80	83	5.170.000.000	86	5.500.000.000	89	5.800.000.000	92	6.100.000.000	95	6.400.000.000	
						Hasil :Terpenuhinya kebutuhan pengembangan kemampuan pencari kerja													
2	07	03	2.01	0001	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun - n	Orang	240	250	4.800.000.000	260	5.000.000.000	270	5.200.000.000	280	5.400.000.000	290	5.600.000.000	
						Hasil : Terlaksananya Proses Pendidikan & Pelatihan Keterampiran Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi													

2	07	03	2.01	0003	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Unit	45	45	370.000.000	45	500.000.000	45	600.000.000	45	700.000.000	45	800.000.000	
						Hasil : Tersedianya Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota													